

REVISI
NASKAH AKADEMIK ORGANISASI DAN
TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Revisi Naskah Akademik Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum dapat diselesaikan.

Perubahan Universitas Negeri Padang sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan UNP pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menuntut adanya perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja UNP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015. Perubahan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi UNP saat ini dan dasar dilakukannya usulan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum tahun 2016.

Padang, Februari 2018
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
BAB II KONDISI UNP SAAT INI	3
A. KEADAAN LEMBAGA	3
1. TUPOKSI, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SAAT INI	3
2. KEGIATAN PENDIDIKAN	17
3. KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	46
4. KERJASAMA	55
B. SUMBER DAYA	74
1. DOSEN	74
2. TENAGA KEPENDIDIKAN	79
3. MAHASISWA	80
4. SARANA-PRASANA	88
5. ANGGARAN	93
C. PERMASALAHAN	94
BAB III RENCANA PENGEMBANGAN	99
A. VISI, MISI DAN TUJUAN	99
1. VISI	99
2. MISI	99
3. TUJUAN	99
B. PERENCANAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNP	100
BAB IV USULAN PERUBAHAN OTK	107
A. DASAR PERUBAHAN OTK	107
B. USULAN SUSUNAN OTK	108
C. PENATAAN OTK	114
BAB V PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah mahasiswa asing dalam short course BIPA	19
Tabel 2.2	Mahasiswa UNP penerima Beasiswa Tahun 2014-2017	20
Tabel 2.3	Data Mahasiswa UNP yang Memiliki Keterbatasan Fisik	22
Tabel 2.4	Data Propinsi Asal Mahasiswa PMDK/SNMPTN Undangan UNP Tahun 2014 – 2017	23
Tabel 2.5	Data mahasiswa UNP Tahun 2011 s/d 2017	24
Tabel 2.6	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Tahun 2013 s.d 2017	29
Tabel 2.7	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program S-2 Tahun 2013-2017	30
Tabel 2.8	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program S-3 Tahun 2013-2017	30
Tabel 2.9	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program D IV Tahun 2013-2017 ...	31
Tabel 2.10	Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program D III Tahun 2013-2017 ...	31
Tabel 2.11	Rata-rata Masa Studi Mahasiswa dan IPK Lulusan Tahun 2013-2017	32
Tabel 2.12	Sebaran Nilai dan Mutu	39
Tabel 2.13	Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional (2013 s/d 2017)	48
Tabel 2.14	Sumber Dana Penelitian 2014 s/d 2017	49
Tabel 2.15	Keterlibatan Dosen dalam Penelitian 2014 s/d 2017	49
Tabel 2.16	Rekapitulasi Penelitian Menurut Fungsional Fakultas Tahun 2017	50
Tabel 2.17	Beberapa Kegiatan Kerja sama UNP dengan Institusi Dalam Negeri yang Berimplementasi pada Pendapatan UNP	55
Tabel 2.18	Daftar Kerja Sama UNP dengan Instansi Dalam Negeri	56
Tabel 2.19	Kerja Sama dengan Lembaga Luar Negeri	69
Tabel 2.20	Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2014 – 2017	74
Tabel 2.21	Data Dosen yang Sedang Melakukan Studi Lanjut Tahun 2017	75
Tabel 2.22	Perbandingan Dosen Berlatar Belakang Kependidikan dan Non Kependidikan	76
Tabel 2.23	Jumlah Dosen Berdasarkan Kepangkatan	77
Tabel 2.24	Rekapitulasi Dosen UNP yang Telah Disertifikasi sebagai Pendidik Profesional Tahun 2013-2017	78
Tabel 2.25	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2014-2017	79

Tabel 2.26	Jumlah Mahasiswa Menurut Jenjang Program Studi Keadaan Tahun 2013-2017	80
Tabel 2.27	Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun 2014-2017 (SBMPTN)	82
Tabel 2.28	Rekapitulasi Rata-rata IPK Lulusan Tahun 2014-2017	83
Tabel 2.29	Rata-rata Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2014-2017	84
Tabel 2.30	Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2014-2017	84
Tabel 2.31	Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan, Dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2015-2017	86
Tabel 2.32	Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016-2017	87
Tabel 2.33	Penghargaan yang Diperoleh Mahasiswa pada Tahun 2017	88
Tabel 2.34	Lokasi, Kepemilikan, Penggunaan dan Luas Lahan	90
Tabel 2.35	Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, ruang dosen)	91
Tabel 2.36	Data prasarana lain yang mendukung terwujudnya visi	91
Tabel 2.37	Jumlah Judul Cetak, Elektronik dan <i>Copy</i> di Perpustakaan UNP ...	93
Tabel 2.38	Jumlah Penerimaan Dana Tahun 2017 (dalam ribuan rupiah)	93
Tabel 2.39	Jumlah Penggunaan Dana Tahun 2017	94
Tabel 2.40	Daftar Nama Unsur Penunjang dan Perubahannya	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Mahasiswa yang Terlibat PKM Keadaan 2015	26
Gambar 2.2	Usulan dan Pendanaan Program Kewirausahaan UNP	27
Gambar 2.3	Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Keadaan Tahun 2011-2015	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penuh dengan persaingan sehingga pendidikan nasional menghadapi tantangan yang berat dan multi dimensional. Di sisi lain, pendidikan nasional dituntut untuk dapat menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter kebangsaan yang tangguh.

Sejalan dengan itu, dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makna dan implikasi dari fungsi dan tujuan itu bahwa pendidikan nasional diimplementasikan secara fungsional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapainya tidak mudah, diperlukan upaya yang serius dan kerja keras serta strategi pencapaian yang tepat, berkesinambungan, akuntabel pada setiap jalur dan satuan pendidikan.

UNP sebagai salah satu perguruan tinggi negeri milik pemerintah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam rumpun disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Universitas Negeri Padang selalu mendasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengambilan keputusan dan/atau kebijakan pendidikan yang berskala nasional.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis yang bertumpu pada kekuatan sendiri tanpa mengabaikan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak terkait UNP selalu berupaya untuk menuju universitas kelas dunia (*word class university*) dalam rangka mengantisipasi ketertinggalan kualitas yang setara dengan universitas-universitas ternama di dunia. Dalam perjalanan kearah itu telah banyak terjadi perkembangan-

perkembangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perkembangan maupun perubahan yang terjadi di UNP menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu permasalahan internal maupun eksternal yang perlu dipecahkan dan dicarikan solusinya. Untuk itulah, kegiatan maupun pengelolaan akademik dan non-akademik di UNP harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global dengan tetap memperhatikan Statuta, Organisasi dan Tata Kerja serta Renstra.

Seiring dengan dinamika Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dengan adanya PP No. 66 tahun 2018 dan UU No. 12 tahun 2012. Perubahan eksternal ini memerlukan review terhadap status pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Sejak tahun 2015, UNP berubah status menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015. Oleh karena itu, struktur organisasi dan tata kelola keuangan harus menyesuaikan dengan perubahan status tersebut, sesuai peraturan Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan.

Dalam kerangka arah pemikiran tersebut, agar tugas pokok maupun tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berjalan dengan lancar serta tercapai sesuai dengan yang diharapkan diperlukan layanan unggul dan berkualitas. Untuk itu, penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan UNP dipandang penting untuk dilakukan supaya lebih responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan universitas serta terhadap perkembangan global.

B. Tujuan

Tujuan penataan Organisasi dan Tata Kerja UNP adalah untuk menciptakan iklim organisasi yang lebih tertata secara sistematis, serta kelengkapan mekanisme sistem organisasi dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian UNP akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan mengakomodir perkembangan universitas saat ini dan di masa depan sejalan dengan bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah serta perkembangan masyarakat global.

BAB II

KONDISI UNP SAAT INI

A. Keadaan Kelembagaan

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi saat ini

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di lembaga Universitas Negeri Padang disusun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP. Keputusan ini kemudian diubah terakhir kali melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015. Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini, maka Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNP memiliki organ yang terdiri atas Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pertimbangan. Untuk lebih detail gambaran OTK UNP dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

b. Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNP. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

1) Rektor dan Wakil Rektor

Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga pendidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor menyelenggarakan fungsi

- a) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi,
- b) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- c) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,

- d) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan,
- e) pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Peran atau tugas masing-masing wakil rektor seperti berikut:

- a) Wakil Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I, bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menunjuk Pembantu Rektor I sebagai Pelaksana Harian apabila berhalangan.
- b) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II, bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
- c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III, bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- d) Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV, bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerjasama dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

2) Biro

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UNP yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan UNP. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor. Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri atas Biro Akademik dan Kemahasiswaan; Biro Umum dan Keuangan; dan Biro Perencanaan, Administrasi Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

a) Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dipimpin oleh seorang Kepala. BAK dalam menjalankan tugas memberikan layanan di bidang akademik dan pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud diatas tadi menyelenggarakan mempunyai

fungsi :

- (1) Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian;
- (2) Pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;
- (3) Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; dan
- (4) Pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya

BAK terdiri dari 2 (dua) Bagian dan masing-masing memiliki 2 (dua) Subbagian yaitu:

(1) Bagian Akademik, meliputi:

- Subbagian Pendidikan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan serta penyusunan kebutuhan dan pengaturan penggunaan sarana pendidikan.
- Subbagian Registrasi dan Statistik, mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pengolahan data, dan penyusunan statistik mahasiswa.

(2) Bagian Kemahasiswaan,

- Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa dan administrasi kegiatan kemahasiswaan serta informasi pengembangan kemahasiswaan, dan
- Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan alumni, mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan pengelolaan jurnal kemahasiswaan serta penyusunan dan pengolahan data, dan penyusunan statistik alumni serta fasilitasi alumni.

b) Biro Umum dan Keuangan (BUK)

Biro Umum dan Keuangan (BUK) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dipimpin oleh seorang Kepala. BUK mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BUK mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi
- Pelaksanaan urusan kepegawaian

- Pelaksanaan urusan hukum
- Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan
- Pelaksanaan urusan kerumahtangaan
- Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

BUK terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan 9 (sembilan) Subbagian, yaitu:

(1) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi di lingkungan UNP. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Keuangan dibantu oleh tiga sub bagian yaitu:

- Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak; Tugas dari subbagian ini adalah melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak;
- Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tugas dari subbagian ini yaitu melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggung jawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak
- Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Tugas dari subbagian ini yaitu melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

(2) Bagian Kepegawaian,

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi lainnya;
- Pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

Dalam bagian ini terdapat dua subbagian yaitu

- Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga penunjang akademik; dan

- Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan serta pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan

(3) Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara

Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, keprotokolan dan kerumahtanggaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana
- Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan
- Pelaksanaan keprotokolan
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

Bagian dari biro ini dibantu oleh beberapa subbagian yaitu

- Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, organisasi, dan tata laksana
- Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan, dan layanan pimpinan. dan
- Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan

c) Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM)

Biro Perencanaan Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan, pengembangan kerjasama dan Hubungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dipimpin oleh seorang Kepala. BPAKHM dalam melaksanakan tugas melaksanakan perumusan rencana, kerjasama dan humas mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran
- (2) Administrasi kegiatan kerjasam dalam dan luar negeri

- (3) Koordinasi dan pelaksanaan program kerjasama dalam negeri
- (4) Pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rencana, program dan anggaran.

BPAKHM terdiri dari 2 (dua) Bagian dengan 4 (empat) Subbagian, yaitu:

(a) Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pengembangan UNP
- Penyusunan Program dan Anggaran
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran
- Penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran

Bagian perencanaan didukung oleh dua subbagian yaitu:

- Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pengembangan UNP, dan bahan rencana, program, dan anggaran; dan
- Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran

(b) Bagian Administrasi Kerjasama dan Humas

Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama, serta pemberian layanan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Administrasi kerjasama dan Humas mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri
- Pelaksanaan administrasi kegiatan kerjasam dalam dan luar negeri
- Pemberian layanan informasi dan dokumentasi
- Pelaksanaan publikasi
- Pelaksanaan hubungan masyarakat

Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai dua subbagian yaitu

- Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan
- Subbagian Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan layanan informasi dan dokumentasi, serta penyiapan bahan publikasi, peliputan kegiatan UNP dan Hubungan Masyarakat.

3) Fakultas

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik UNP yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNP yang berada di bawah Rektor, dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung langsung kepada Rektor. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas.

Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan, yaitu :

- a) Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan dan administrasi umum dan sistem informasi.
- c) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fakultas mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
- b) Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Fakultas terdiri dari: (1) Dekan dan Wakil Dekan, (2) Senat Fakultas, (3) Bagian Tata

Usaha (4) Jurusan (5) Laboratorium/ Bengkel/Studio, (5) dan Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. Fakultas yang ada di UNP adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), dan Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP).

Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jurusan terdiri dari: (1) Ketua Jurusan; (2) Sekretaris Jurusan, (3) Program Studi dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Kementerian Ristek Dikti.

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Jurusan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional bidang kependidikan dan/atau non kependidikan. Penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada jurusan ditunjang dengan laboratorium/ studio. Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium/bengkel/studio pada setiap Fakultas ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen adalah kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan akademik atau profesional di Fakultas didukung oleh Bagian Tata Usaha yang bertugas untuk melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara dan pelaporan dilingkungan Fakuultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi, yaitu:

- a) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- c) Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
- d) Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
- e) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
- f) Pelaksanaan pengeolaan data Fakultas; dan
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas.

Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta adminitrasi dan alumni, (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian yang bertugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran fakultas, pengelolaan data dan layanan informasi, evaluasi dan pelaporan, serta urusan keuangan, ketatalaksanaan dan kepeawaian, (3) Subbagian Umum dan Barang Miik Negara mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

4) Program Pascasarjana

Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNP yang berada di bawah Rektor, dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Direktur Pascasarjana mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin. Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur, yaitu : (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiwaan yang disebut Wakil Direktur I yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta urusan kemahasiswaan dan alumni dan kerjasama di lingkungan Pascasarjana, (2) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan yang disebut Wakil Direktur II yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, sistem informasi, kepegawaian dan sarana prasarana.

Program Pascasarjana terdiri atas: Direktur dan Wakil Direktur, dan Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, sistem informasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Pascasarjana.

Subag Tata Usaha tersebut, secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Direktur, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Akademik, dan Kemahasiswaan.

5) Lembaga

a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNP di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- (2) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (5) pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/ atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri

- (7) pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (8) pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Pusat, Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian/ pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya tersebut dapat menunjuk dosen/ tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator. Pembentukan dan Penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- (2) pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) pelaksanaan urusan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan
- (6) pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan lembaga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : (1) Subbagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan (2) Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

b) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UNP di bidang peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan yang berada di bawah Rektor. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dipimpin seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Lembaga Pengembang Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- (2) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- (3) Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- (5) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- (6) Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Pusat, Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga. Untuk menyelenggarakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan

mutu;

- (3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- (4) Pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
- (5) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan lembaga.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: (1) Subbagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi pengembangan pembelajaran; dan (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang akademik atau sumber belajar UNP yaitu:

a) UPT Perpustakaan

Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dan pembinaannya dibawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik. Kepala UPT Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan kepastakaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Perpustakaan mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran UPT;
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- (3) Pengolahan bahan pustaka;
- (4) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- (5) Pemeliharaan bahan pustaka; dan
- (6) Pelaksanaan urusan tatausaha UPT.

Perpustakaan terdiri dari: Kepala, Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Pustakawan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan,

kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan. Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan, sedangkan jenis dan jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelola barang milik negara UPT. Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan.

b) UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengolahan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, dan pembinaannya berada dibawah koordinasi Wakil Rektor IV bidang Kerjasama dan Sistem Informasi. UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran UPT;
- (2) Pelaksanaan pengembangan jaringan dan website UNP;
- (3) Pelaksanaan pendataan dan pemograman;
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multimedia;
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- (6) Pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa; dan
- (7) Pelaksanaan administrasi UPT.

UPT Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari: Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara UPT, Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala UPT.

2. Kegiatan Pendidikan

Dalam kegiatan Pendidikan ini akan dipaparkan mengenai fakultas, jurusan/prodi, keadaan mahasiswa, dan sarana penunjang yang dimiliki. UNP memiliki 8 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Parawisata dan Perhotelan (FPP), dan 1 Program Pascasarjana. Sejak dilaksanakannya kebijakan *wider-mandate* (dari tahun 1999 sampai sekarang), jumlah jurusan/program studi di UNP terus berkembang dari yang semula hanya 27 jurusan/program studi, maka pada tahun 2016 ini telah mencapai 98 program studi yang menyelenggarakan program-program pendidikan akademik (S1, S2, dan S3), pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi (D1 sampai D4). Dengan didirikannya Lembaga Pengembangan Tenaga Profesional (LPTP) pada tahun 2007, UNP membuka diri secara lebih luas untuk melayani kegiatan pengembangan profesional tenaga kependidikan dan nonkependidikan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di dalamnya program sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan bahwa UNP memiliki respon dan layanan yang cukup memadai terhadap masyarakat akan kebutuhan pendidikan tinggi.

UNP tidak hanya memperhatikan kuantitas program studi dalam melayani kebutuhan masyarakat, tetapi juga berusaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program studi, baik dalam pengelolaan dan efisiensi, maupun dalam hal kualitas dan relevansinya. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh nilai akreditasi program studi yang telah terakreditasi. Pada saat ini, UNP memiliki 30 buah prodi terakreditasi A (30,6%), 50 buah prodi terakreditasi B (51%), dan 2 buah prodi yang terakreditasi C (2%). Sisanya sebanyak 16 buah prodi (16,3%) saat ini dalam proses pengusulan akreditasi, mengingat prodi-prodi tersebut masih baru. Proses akreditasi institusi yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah berhasil menempatkan akreditasi UNP dengan nilai A.

a. Mahasiswa

Dalam penerimaan mahasiswa baru, setiap tahun UNP menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru untuk program sarjana, magister, doktor dan/atau diploma yang telah disusun dalam buku panduan penerimaan mahasiswa baru. Buku panduan ini memuat: 1) kebijakan umum universitas tentang penerimaan

mahasiswa baru, 2) kriteria penerimaan mahasiswa baru, 3) prosedur penerimaan mahasiswa baru, 4) instrumen penerimaan mahasiswa baru, 5) sistem pengambilan keputusan atau penetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru. Buku panduan ini ditaati secara konsisten di dalam penerimaan mahasiswa baru UNP.

Universitas Negeri Padang mempunyai 3 (tiga) kebijakan dalam hal jalur penerimaan, yaitu penerimaan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan seleksi Mandiri yang merupakan tes yang dilakukan sendiri dengan kebijakan sendiri oleh Universitas Negeri Padang. Seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN digunakan untuk merekrut calon mahasiswa baru jenjang S1 dan D4. Kebijakan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan panitia pelaksana SNMPTN 2015 dan tentang proses penerimaan mahasiswa baru.

Seleksi jalur Mandiri digunakan untuk merekrut calon mahasiswa baru Jenjang S1, S2, S3, Diploma (yang merujuk kepada SK Rektor UNP Nomor: 89/UN35/PP/2014), Pendidikan Profesi, Program Kerja Sama, Program Peningkatan Kualifikasi Guru (Program PPKHB) (yang merujuk kepada Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 015/P/2015), Mahasiswa Warga Negara Asing, dan Mahasiswa Pindahan/Transfer. Kuota penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 dan Diploma IV melalui jalur Mandiri adalah $\leq 20\%$. Penerimaan calon mahasiswa baru jenjang S1, Diploma, Pendidikan Profesi, dan PPKHB baik melalui jalur SNMPTN, maupun SBMPTN, Mandiri, dan Prestasi hanya dilakukan sekali satu tahun, yaitu pada semester ganjil. Sementara penerimaan jalur Mandiri untuk program S2, S3, dan Mahasiswa Asing dilakukan setiap semester, yaitu pada semester ganjil dan genap.

Untuk menjaga kredibilitas, transparansi, dan keakuratan data, pendaftaran calon mahasiswa, baik jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri dilakukan secara *online* pada portal UNP. UNP menerima mahasiswa sebanyak 40% dari seluruh daya tampung yang ada dengan jalur SNMPTN, 30% dari jalur SBMPTN dan sisanya melalui jalur mandiri untuk jenjang S1 dan D4.

Selain mahasiswa yang mengikuti program yang sudah dijelaskan sebelumnya, UNP juga melaksanakan program bagi mahasiswa asing yang mengikuti program tidak bergelar (*non degree training*) seperti kursus Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di UNP. Data mahasiswa asing selama 3 tahun terakhir seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah mahasiswa asing dalam *short course* BIPA

No.	Kewarganegaraan	Tahun	Non-Degree Program		Degree Program		
			1-6 bln.	6-12 bln.	S1	S2	S3
1.	Australia	2011	9	-	-	-	-
2.	-	2012	-	-	-	-	-
3.	Australia	2013	24	-	-	-	-
4.	Australia	2014	-	-	-	-	-
5.	Australia	2015	-	-	-	-	-
6.	Australia	2016	-	-	-	-	-
7.	Australia	2017	7	-	-	-	-

Penerimaan mahasiswa asing dari asal Australia ini merupakan program kerjasama yang telah berjalan selama 20 tahun sejak tahun 1993 dengan Deakin University yang dikoordinir oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di samping program kerjasama dengan Deakin University Australia, program BIPA ini juga pernah dilaksanakan dengan mahasiswa asal Selandia Baru, Amerika, dan Jerman dengan durasi pelatihan 1-3 bulan. Penerimaan mahasiswa BIPA ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Setelah terakhir dilaksanakan tahun 2013, pada tahun 2015 sudah dilaksanakan seleksi sebanyak 25 orang

Berdasarkan SK Rektor UNP Nomor: 89/UN35/PP/2014, UNP juga mengeluarkan kebijakan untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik, kurang mampu secara ekonomi, dan fisik. Kebijakan tersebut adalah:

- 1) Untuk Mahasiswa yang memiliki potensi akademik yaitu mahasiswa yang memiliki sertifikat, piagam/SK yang berkaitan dengan prestasi di bidang MTQ, Hafiz Al-Quran, Olimpiade Sains, Seni, Lomba Keterampilan Siswa (LKS), dan olahraga, diizinkan untuk tidak mengikuti tes tertulis. Calon mahasiswa tersebut mendaftar secara *online* melalui <http://www.unp.ac.id/>. Calon mahasiswa tersebut di samping memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan diharuskan juga mengunggah sertifikat dan data rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 SLTA.
- 2) Pimpinan universitas telah membuat kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang memiliki potensi secara akademik, tetapi kurang mampu secara ekonomi. Bagi mahasiswa tersebut diberikan bantuan beasiswa pemerintah pusat seperti beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA), Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBPPA), beasiswa Bidikmisi, Beasiswa

Unggulan (BU). Beberapa beasiswa lainnya seperti beasiswa Bank Nagari, Bank Indonesia, Bank Lippo, Bank Republik Indonesia, BAZ, Semen Padang, Toyota Astra, dan VDMS (Belanda).

Secara statistik, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di UNP sebanyak 7176 orang atau 24,19 persen dari total mahasiswa UNP dan diproyeksikan setiap tahun akan terus meningkat karena adanya kebijakan dan komitmen pimpinan universitas untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Berdasarkan rekapitulasi data, penerima beasiswa terus mengalami peningkatan setiap tahun seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Mahasiswa UNP penerima Beasiswa Tahun 2014-2017

No	Nama Beasiswa	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Bidik Misi	3435	5035	5345	5205
2	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	1260	1236	111	1400
3	Biaya Pendidikan PPA	540	260	105	-
4	Supersemar	55	55	-	-
5	Semen Padang	12	10	6	7
6	Bank Nagari	160	200	200	104
7	BNI	-	20	-	-
8	BAZ Tanah Datar	-	-	-	7
9	BAZ Pariaman	-	-	-	48
10	BAZ Prov. Sumbar	322	-	38	192
11	BAZ Sibolga	-	-	-	5
12	Van Deventer - <i>Maas Sticing</i> (VDMS)	45	45	76	69
13	Bank Indonesia	40	-	40	40
14	Yayasan Toyota dan Astra	10	-	10	10
15	Beasiswa BTN	-	-	10	3
16	BBP BTN	-	-	-	-
17	Beasiswa PT Pelindo 2	-	-	-	31
18	BBP PT Pelindo 2	-	-	-	1
19	Beasiswa Bulog	-	-	-	31
20	BBP Bulog	-	-	-	1
21	Beasiswa Inna Indonesia	-	-	-	10
22	BBP Inna Indonesia	-	-	-	1
23	Beasiswa Is Anwar	-	-	-	20

No	Nama Beasiswa	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
24	BBP Is Anwar	-	-	-	1
25	Beasiswa Mandiri Syariah	-	-	-	23
26	Supersemar Unggulan	2	-	-	-
27	Pertamina	-	-	-	-
28	LIPPO	-	-	50	-
29	Badan Amil Zakat	-	-	23	39
30	ADIK Papua	-	-	23	39
	Jumlah	5.911	6.937	6.082	7.255

Selama ini, belum ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena tidak mampu membayar uang kuliah di UNP, asalkan mahasiswa tersebut melapor ke dosen Pembimbing Akademik (PA). Berdasarkan rekomendasi PA maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) kepada Rektor setelah melalui proses penilaian oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan (WD 2) dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pegawai dan Umum (WR 2). Pada tahun 2015 ada beberapa orang mahasiswa sedang proses pengurusan keringanan atau peninjauan ulang besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas permintaan mahasiswa/orang tua mahasiswa. Pimpinan universitas membentuk tim untuk melakukan verifikasi keabsahan data ekonomi keluarga secara langsung ke lokasi atau rumah mahasiswa tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan oleh pimpinan universitas. Secara rinci alur pendaftaran beasiswa UNP dapat diunduh pada <http://sib.unp.ac.id>.

Selain itu, secara berkesinambungan setiap semesternya UNP memberikan bantuan pada mahasiswa berprestasi dalam bidang penalaran, minat dan bakat pada tingkat nasional dan internasional seperti cabang olah raga, debat konstitusi, LKTI, MTQ, dan sebagainya. Mahasiswa yang berprestasi diberikan keringanan SPP sesuai dengan prestasi yang diperolehnya sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 011/UN35/KP/2013 sebagai berikut:

- 1) Kejuaraan internasional
 - Medali emas dibebaskan SPP 3 semester
 - Medali perak dibebaskan SPP 2 semester

- Medali perunggu dibebaskan SPP 1 semester
- 2) Kejuaraan nasional
 - Medali emas dibebaskan SPP 2 semester
 - Medali perak dan perunggu dibebaskan SPP 1 semester
- 3) Kebijakan untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik.

Universitas Negeri Padang memberi kesempatan untuk calon pelamar yang memiliki keterbatasan fisik. Hal tersebut dibuktikan dengan menerima mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik yang tersebar di beberapa fakultas di Universitas Negeri Padang. Selain itu, UNP juga menyediakan fasilitas yang dapat membantu kelancaran mereka dalam belajar, seperti lift, kursi roda, alat pembelajaran audiovisual. Data mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Data Mahasiswa UNP yang Memiliki Keterbatasan Fisik

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa yang Memiliki Keterbatasan Fisik
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	35 orang
2	Fakultas Bahasa dan Seni	5 orang
3	Fakultas MIPA	3 orang
4	Fakultas Ilmu Sosial	3 orang
5	Fakultas Teknik	-
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	-
7	Fakultas Ekonomi	7 orang
8	Fakultas Perhotelan dan Pariwisata	-
Jumlah		53 orang

Kebijakan untuk penerimaan mahasiswa baru UNP tidak mempertimbangkan Agama, Ras, dan Suku karena kelulusan calon mahasiswa UNP ditentukan oleh nilai dan kuota masing-masing prodi. Hal itu dibuktikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNP dalam menerima mahasiswa baru yang tidak mensyaratkan suku, agama, ras, dan gender tertentu. Prinsip ekuitas itu terlihat dari keberagaman agama, suku, dan budaya dari

mahasiswa yang diterima di UNP. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan ada mahasiswa yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Minangkabau, Papua, dan Tionghoa. Dari segi agama yang dianut oleh mahasiswa juga ditemukan beragam, ada mahasiswa yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Universitas Negeri Padang menerapkan prinsip pemerataan wilayah di dalam penerimaan mahasiswa baru. Di dalam penerimaan calon mahasiswa jalur SNMPTN, UNP memperhatikan prinsip pemerataan wilayah. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor adalah paling tidak 20% calon mahasiswa UNP berasal dari wilayah di luar Sumatera Barat. Disamping itu, UNP juga memperhatikan pemerataan antara kabupaten/kota dan sekolah, sehingga tidak menumpuk pada satu daerah maupun sekolah, dengan tetap memperhatikan skor tertinggi. Asal mahasiswa SNMPTN yang diterima di UNP dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Data Propinsi Asal Mahasiswa PMDK/SNMPTN Undangan UNP Tahun 2014 - 2017

No	Provinsi	Jumlah mahasiswa
1	JAKARTA	17
2	JAWA BARAT	20
3	JAWA TENGAH	5
4	JAWA TIMUR	2
5	ACEH	94
6	SUMATERA UTARA	477
7	SUMATERA BARAT	5429
8	RIAU	395
9	JAMBI	710
10	SUMATERA SELATAN	73
11	LAMPUNG	5
12	KALIMANTAN SELATAN	1

No	Provinsi	Jumlah mahasiswa
13	KALIMANTAN TIMUR	2
14	SULAWESI UTARA	1
15	NUSA TENGGARA BARAT	1
16	BENGKULU	230
17	BANGKA BELITUNG	7
18	BANTEN	9
19	KEPULAUAN RIAU	63

Data seluruh mahasiswa program jalur akademik (S-1, S-2, S-3), profesi (profesi, spesialis 1, spesialis 2), dan vokasi (D-1, D-2, D-3, D-4) dalam lima tahun terakhir (2013 s/d 2017) dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Data mahasiswa UNP Tahun 2011 s/d 2017

Seleksi			Jumlah Mendaftar	student body (s1,s2,s3)
Tahun	Ikut Seleksi	Lulus Seleksi		
2013	68.638	7.385	6.314	28.065
2014	70.516	5.997	5.496	27.214
2015	69.599	7.174	6.620	27.755
2016	48.943	7.945	7.463	28.427
2017	48.016	10.415	9.288	31.878
Seleksi			Jumlah Mendaftar	student body (profesi)
Tahun	Ikut Seleksi	Lulus Seleksi		
2013	115	62	58	62
2014	100	61	53	29
2015	61	55	55	78
2016	84	66	64	66
2017	45	36	34	34

Seleksi			Jumlah Mendaftar	student body (Vokasi)
Tahun	Ikut Seleksi	Lulus Seleksi		
2013	1.100	1.618	1.254	4.275
2014	1.050	1.403	1.311	4.631
2015	1.120	1.549	1.423	4.732
2016	7.153	1.914	1.788	5.306
2017	6.907	1.996	1.866	5.562

Untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, UNP melakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 1) Layanan kegiatan akademik dan 2) Layanan kegiatan kemahasiswaan. Survei ini dilakukan setiap akhir semester, secara *online* melalui laman akademik UNP, yaitu <http://evaluasi.unp.ac.id>; dan mahasiswa diwajibkan mengisi daftar isian sesuai dengan butir-butir yang ada pada instrumen.

Selain ditingkat universitas, masing-masing fakultas juga mengadakan survey untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan, terutama di bidang pembelajaran setiap semester. Survey ini mengukur 5 hal yang berkaitan dengan PBM yaitu;

- (1) Materi perkuliahan yang berkaitan dengan kebaruan materi, cakupan, sistematika, cara menjelaskan, dan manfaat;
- (2) Dosen yang berkaitan dengan penguasaan materi, ketepatan waktu dalam melaksanakan perkuliahan, loyalitas, dan kemampuan pengelolaan kelas;
- (3) Penyajian materi yang meliputi variasi penyajian, variasi komunikasi, dan variasi media yang digunakan; sistem evaluasi yang digunakan, dan
- (4) Iklim kelas yang meliputi suasana kelas, dan suasana pembelajaran.

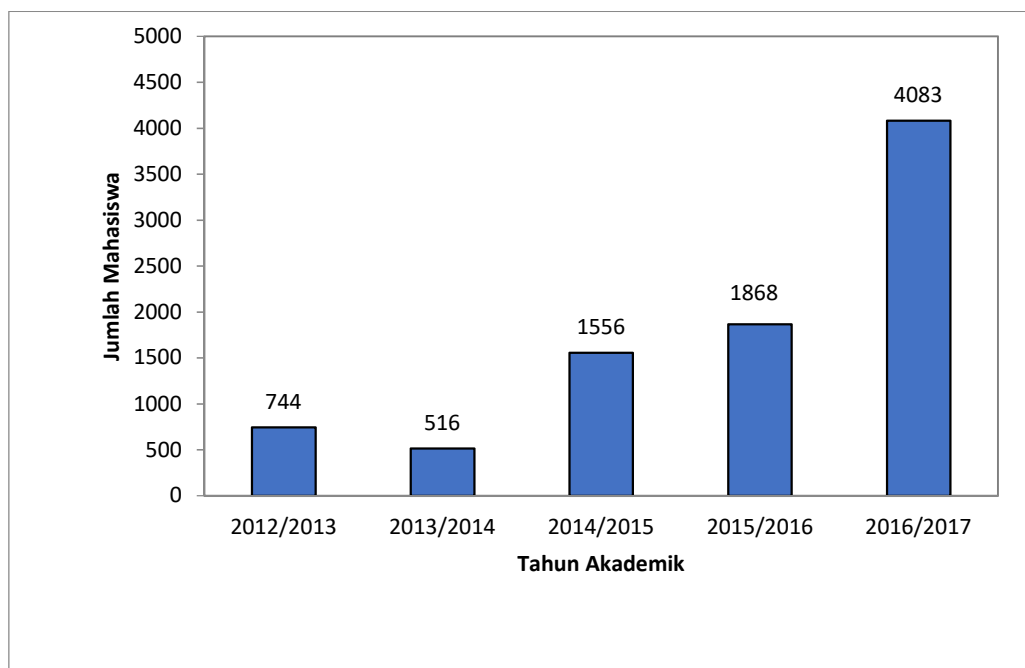
Instrumen tersebut mudah digunakan yang dibuktikan dengan item pertanyaan yang menghendaki jawaban tertutup dari responden. Di samping itu, sebelum digunakan instrumen telah diuji kesahihannya oleh tim evaluasi UNP yang berada dalam GPMI. Instrumen juga sudah divalidasi oleh tim validasi data yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

Upaya UNP dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik dilakukan secara terprogram. Prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa UNP sangat banyak, antara lain prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, PKM, olahraga, dan seni. Upaya institusi dalam meningkatkan prestasi mahasiswa adalah sebagai berikut. Di UNP, kegiatan kemahasiswaan diakomodasi dalam berbagai program

yang bertujuan mewujudkan mahasiswa yang bertaqwa, cerdas, kritis, santun, berakhlak mulia, demokratis, bertanggungjawab, disiplin, dan berdaya saing. Oleh karena itu, mahasiswa UNP tidak hanya belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan akademis (kurikuler) saja, tetapi juga diberi berbagai pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat (kegiatan ekstra kurikuler). Kegiatan mahasiswa di dalam kampus mencakup pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, dan pembinaan sumber daya manusia berkualitas yang berkesinambungan. Secara lebih spesifik, pembinaan atau bimbingan yang dilakukan kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan prestasinya, antara lain adalah:

a) Untuk Kegiatan PKM

Memberikan pelatihan dan bimbingan membuat proposal dan penulisan karya ilmiah. Pelatihan itu dilakukan sebanyak **dua kali setahun (pada bulan Maret dan bulan Setember)**. Kegiatan ini dikelola oleh Wakil Dekan 3 masing-masing fakultas. Untuk kegiatan PKM animo mahasiswa cukup tinggi terhadap hal tersebut. Hal itu terlihat dari jumlah mahasiswa yang terlibat selalu meningkat setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2017 jumlah mahasiswa yang terlibat PKM adalah 4.083 orang. Perkembangan jumlah mahasiswa yang terlibat PKM terlihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat PKM Keadaan 2017

b) Latihan Kepemimpinan

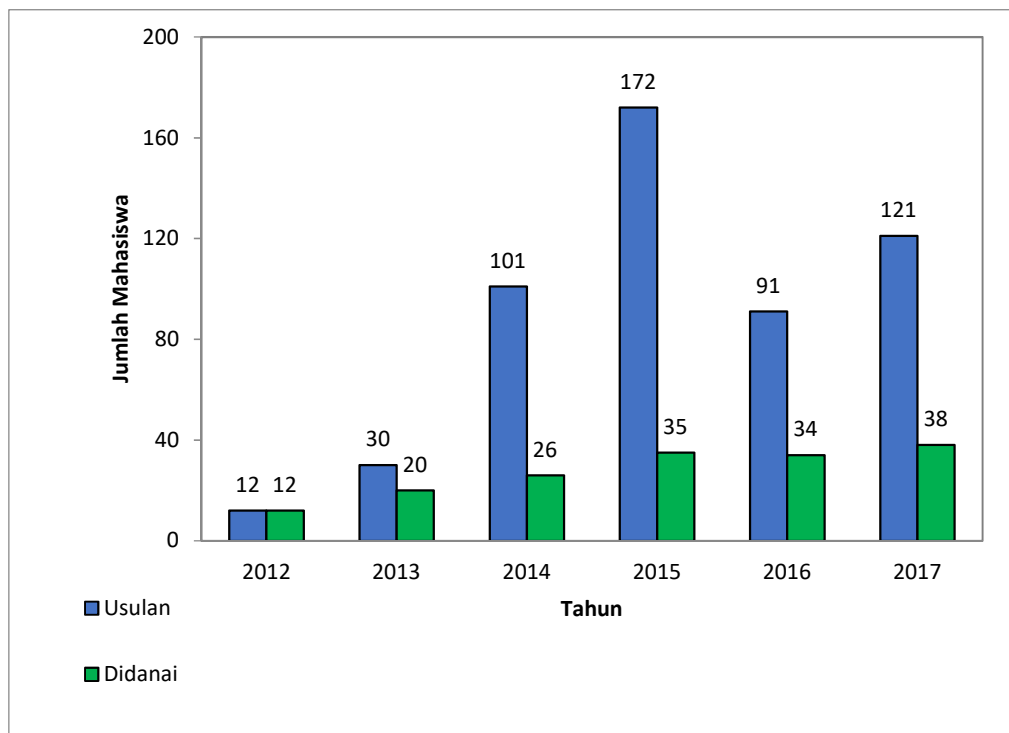
Latihan kepemimpinan yang diadakan di UNP sebanyak tiga tingkatan yaitu tingkat

dasar (enam kegiatan per tahun yang diikuti oleh 900 orang mahasiswa dan melibatkan 20 orang dosen perkegiatan), tingkat menengah (tujuh kegiatan per tahun yang diikuti oleh 350 orang mahasiswa dan melibatkan 20 orang dosen), dan tingkat lanjut (satu kegiatan per tahun yang diikuti oleh 100 orang mahasiswa dan melibatkan 20 orang dosen pertahun). Kegiatan latihan kepemimpinan Tingkat dasar terbuka untuk semua mahasiswa tanpa pengecualian, sedangkan latihan kepemimpinan tingkat menengah diikuti oleh mahasiswa yang lulus latihan kepemimpinan tingkat dasar. Sementara itu latihan kepemimpinan tingkat lanjut diikuti oleh mahasiswa yang lulus tingkat menengah.

c) Latihan Kewirausahaan

Latihan kewirausahaan dilakukan tiga kali setahun menjelang wisuda, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan September. Kegiatan ini diperuntukkan bagi calon wisudawan yang akan bergerak di dunia kerja. Kegiatan ini berfungsi untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship bagi lulusan. Di samping itu, UNP mengadakan kegiatan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) yang menyediakan dana 20 juta rupiah bagi masing-masing proposal yang lolos seleksi.

Animo mahasiswa UNP terhadap dunia wirausaha cukup tinggi. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya mahasiswa yang ikut berwirausaha setiap tahun, yang terlihat dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Usulan dan Pendanaan Program Kewirausahaan Tingkat Universitas

Berdasarkan gambar 2.2, terlihat bahwa mahasiswa UNP cukup kreatif dalam mengembangkan produk yang diperlukan untuk kemaslahatan. Hal ini juga mahasiswa UNP kreatif dalam menyikapi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam aspek kehidupan, seperti pendidikan, teknologi, keamanan, dll. Terdapat kenaikan jumlah usulan untuk dari 101 pada tahun 2014 menjadi 38 pada tahun 2017.

d) Kegiatan Kesenian, Penulisan, dan Jurnalistik

Kegiatan ini dilakukan secara reguler dan berkelanjutan Sebanyak **tiga kali seminggu (yaitu pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu)** dengan kegiatan meliputi kesenian, penulisan, dan jurnalistik. Kegiatan ini sudah menghasilkan komposer, pemusik, penari, penulis dan jurnalis yang berprestasi.

e) Kegiatan Keolahragaan

UNP menyediakan wadah bagi mahasiswa yang mau meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Kegiatan ini dilakukan secara reguler dan berkelanjutan, **tiga kali seminggu (yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu)**, dan dikelola oleh dosen serta mahasiswa yang memiliki prestasi olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kegiatan ini meliputi pelatihan di bidang karate, renang, taekwondo, atletik dan lain-lain. Kegiatan ini sudah menghasilkan atlit-atlit tingkat nasional dan internasional.

Di samping kegiatan di atas, UNP juga melaksanakan kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen. Pada setiap prodi yang ada di UNP, setiap semester melibatkan 10-15 orang mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen;
- (2) Melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan kegiatan seminar nasional, internasional, wisuda, dan lomba;
- (3) Menyenggarakan tutorial keagamaan, pengajian rutin, stadium general, kuliah terbuka dengan mengundang nara sumber dari tokoh nasional atau internasional;
- (4) Mengadakan dan memfasilitasi;
- (5) perlombaan dan pertandingan, antara lain: Lomba karya tulis ilmiah, Lomba bidang studi , Lomba karya teknologi Lomba MTQ Mahasiswa, Lomba bidang olah raga,

Lomba robotik Lomba Pasar Modal

- (6) Menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitasnya, seperti penyediaan sarana dan prasarana ruang teater tertutup dan pentas terbuka untuk mengembangkan kemampuan seni; sarana olah raga, seperti lapangan bola kaki, volley, tennis, bulu tangkis, basket, dan kolam renang; penerbitan koran mahasiswa “Ganto” dan Radio FM untuk pembinaan bidang jurnalistik dan penyiaran; serta sarana pengembangan kemampuan kewirausahaan, seperti koperasi mahasiswa;
- (7) Memberikan *reward* bagi mahasiswa yang berprestasi sebagai berikut: Berdasarkan SK Rektor Nomor 3508/UN35/KP/2017, Nomor 2221/UN35/KP/2017 dan Nomor 2110/UN35/KP/2017 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa yang Berprestasi;
- (8) misalnya, Rektor memutuskan untuk membebaskan mahasiswa yang memperoleh medali pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional dari membayar SPP. Untuk juara satu nasional bebas SPP selama dua semester, dan untuk juara dua dan tiga mendapat hadiah bebas SPPselama satu semester. Sedangkan untuk juara satu tingkat internasional, mahasiswa dibebaskan dari membayar SPP selama 3 semester, dan untuk juara dua dan tiga dibebaskan SPP selama dua semester.

Berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan peningkatan prestasi mahasiswa tersebut dilaksanakan secara terprogram melalui unit-unit kegiatan kemahasiswaan (UKM), BEM, dan BPM. Dalam penyusunan program kegiatan UKM, BEM, dan BPM tersebut senantiasa berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Fakultas, dan Ketua Jurusan/Prodi, dan pembimbing Himpunan Mahasiswa untuk tingkat jurusan dan prodi.

b. Lulusan

Tabel 2.6. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S-1) Tahun 2013 s.d 2017

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	5291	4962	4792	4718	3035	1705

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2014		4507	4192	4018	3951	
2015			5431	5141	4967	
2016				6217	5787	
2017					8137	

Tabel 2.7. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program S-2 Tahun 2013 - 2017

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	736	890	546	212	104	687
2014		779	827	371	142	605
2015			956	1017	534	425
2016				963	1030	
2017					965	

Tabel 2.8. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program S-3 Tahun 2013 - 2017

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	42	47	44	37	30	9
2014		69	74	60	54	5
2015			83	76	73	

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2016				124	124	
2017					138	

Tabel 2.9. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program D IV Tahun 2013 - 2017

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	279	253	245	243	175	62
2014		240	222	209	207	
2015			299	266	259	
2016				404	387	
2017					517	

Tabel 2.10. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program D III Tahun 2013 - 2017

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa per Angkatan					Jumlah Lulus
	2013	2014	2015	2016	2017	
2013	770	670	638	430	141	462
2014		702	620	586	341	235
2015			776	699	671	
2016				1054	955	
2017					1131	

**Tabel 2.11. Rata-rata Masa Studi Mahasiswa dan IPK Lulusan
Tahun 2013 - 2017**

Program Pendidikan	Rata-rata IPK				
	2013	2014	2015	2016	2017
D III	3,1	3,11	3,14	3,14	3,15
D IV	3,28	3,34	3,3	3,27	3,36
S1	3,29	3,29	3,29	3,31	3,33
S2	3,5	3,51	3,49	3,54	3,59
S3	3,66	3,65	3,62	3,64	3,65

c. Kurikulum

Dalam hal relevansi profil lulusan program studi dengan kebutuhan masyarakat, UNP menyadari dan telah melaksanakan evaluasi dan perbaikan kurikulum secara berkala. Kurikulum sebagai perangkat rencana dan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar telah dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan diarahkan kepada visi, misi, tujuan setiap prodi, kurikulum institusional/lokal, dan mengacu kepada kurikulum nasional.

Pengembangan kurikulum dimulai program studi yang disusun berdasarkan kebijakan akademik UNP yang tertuang dalam Peraturan akademik UNP dengan pijakan SK Rektor No. 136/UN35/PP/2011 dan disempurnakan dengan Peraturan Akademik tahun 2015 dengan SK Rektor No. 086/UN35/2015 yang sekaligus mejadi landasan bagi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Panduan Akademik pada tahun 2015 dengan SK Rektor No. 80/UN35/PP/2015 tentang Penetapan panduan akademik. Hal ini sejalan dengan SK Kemendiknas No. 232/47/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa serta SK Kemendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Tahun 2012 terjadi perubahan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang disesuaikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui PP No. 8 tahun 2012. Sejak tahun 2012, UNP melalui Program IDB dan bantuan pengembangan kurikulum dari kemendikbud serta BOPTN dan PBNP, universitas telah melakukan pengembangan kurikulum pada tiap program studi merujuk ke KKNI. Melalui program-program bantuan ini, UNP telah menghasilkan sekitar 2000 perangkat perkuliahan secara bertahap pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Pada

tahun 2015, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan SNPT (Kemenristek Dikti No 44. 2015) dan KKNI.

Sesuai dengan prinsip pengembangan dan struktur kurikulum UNP, mata kuliah di UNP di kelompokkan atas:

- 1) **Mata Kuliah Umum (MKU)**, mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa program Diploma dan Sarjana;
- 2) **Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)** yang wajib diambil oleh mahasiswa yang mengambil program kependidikan (Sarjana Pendidikan); dan
- 3) **Mata Kuliah Keahlian Program Studi**. Khusus untuk kurikulum program pascasarjana disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi akademik dan atau profesional.

Kurikulum UNP menganut sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Berdasarkan Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2014 tentang SNPT dinyatakan Beban belajar program Diploma 3 (D3): 110 – 120 SKS; beban studi D4 dan S1: 144 – 160 SKS; program Magister: 36 – 50 SKS; dan program Doktor: 42 – 60 SKS.

Pengembangan kurikulum program studi didukung oleh institusi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Penyediaan buku panduan pengembangan kurikulum.
- 2) Penyelenggaraan *workshop* pengembangan kurikulum dengan mengundang nara sumber.
- 3) Penyelenggaraan pendampingan dalam proses pengembangan kurikulum.
- 4) Penyediaan anggaran untuk *tracer study* dan pengembangan perangkat pembelajaran.

Berbagai kegiatan dalam pengembangan kurikulum telah didukung oleh universitas. Seperti kegiatan seminar, lokakarya, simposium, *focus group discussion* dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontak dan komunikasi dengan dunia pendidikan dasar dan menengah melalui sekolah-sekolah. Proyek Rekonstruksi dan Peningkatan UNP yang didukung oleh Kemdikbud dan *Islamic Development Bank* (IDB), melalui komponen *curriculum development*. Semenjak tahun 2011 UNP sudah melaksanakan aktualisasi kurikulum berupa *tracer study*, *workshop* kurikulum di tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Prosedur mutu mengatur bahwa evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala, yakni 2 tahun sekali dengan melibatkan lulusan, para pengguna lulusan (*user*), dan

stakeholders lainnya. Untuk menjamin mata kuliah yang ditawarkan pada mahasiswa per semester sesuai dengan kurikulum, UNP mewajibkan semua kurikulum program studi yang telah disahkan oleh Rektor untuk disimpan secara elektronik dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) UNP, agar bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pada setiap awal semester, SIA UNP akan menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulumnya secara otomatis.

Pelaksanaan kurikulum dan proses akademik lain di setiap prodi dimonitor secara berkala oleh Badan Penjaminan Mutu Internal, baik yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan. Evaluasi terhadap kurikulum program studi dilakukan dengan mempertimbangkan balikan dari Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), angket *online* mahasiswa, dan data *tracer study*.

d. Pembelajaran

Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya dilakukan oleh unit-unit terkait.

UNP memiliki lembaga/badan khusus yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran. Lembaga khusus Pusat Kajian Kurikulum (PKK) yang dibentuk oleh rektor UNP dengan SK Rektor No.131/UN35/PP/2012 kemudian dilengkapi dengan Tim pengembang kurikulum UNP dengan SK Rektor No. 31/UN35/PP/2012.

Pusat Kajian Kurikulum dan Pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan model, metode, dan media pembelajaran yang efektif, serta memberikan pelatihan atau sosialisasi model-model pembelajaran yang efektif tersebut kepada para dosen di lingkungan UNP. Beberapa model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sudah dihasilkan dan disosialisasikan kepada para staf pengajar juga sudah diimplementasikan. Model pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh pusat kajian pengembangan kurikulum dan pembelajaran UNP dan sudah diimplementasikan antara lain adalah model pembelajaran pengembangan karakter mahasiswa, model pembelajaran berbasis *web (e-learning)*, dan model pembelajaran berbasis komputer. Kebijakan pembelajaran pembelajaran *e-learning* tertuang Buku Panduan Akademik tahun 2015 dengan SK Rektor No. 80/UN35/PP/2015. Pusat IT

membuat sistem *e-learning* yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa melalui website <http://elearning.unp.ac.id>. Hal ini akan membuat model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa akan menjadi budaya di lingkungan UNP.

Pusat kajian kurikulum dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPMI) di tingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu (GMPI) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPMI) di tingkat jurusan/prodi serta Pusat Kajian Kurikulum. BPM, GPM dan UPM melakukan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sehingga hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh ketiganya menjadi bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum. Semenjak 23 April 2015, melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2015 tentang SOTK UNP, kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pendidikan dan profesi UNP akan dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

BPMI berfungsi untuk mengkaji, mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, pemeliharaan dan peningkatan mutu dalam rangka terjaminnya mutu penyelenggaraan universitas yang sebaik-baiknya. GPMI berfungsi pemeliharaan dan peningkatan mutu dalam rangka terjaminnya mutu penyelenggaraan ditingkat fakultas seterusnya lebih dekat dengan mahasiswa dilakukan oleh UPMI. Untuk memenuhi fungsi tersebut, BPMI mempunyai tugas pokok mengkaji sistem dan mutu di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan. Secara lebih spesifik, tugas BPMI adalah:

- 1) Menyusun perangkat dan panduan penjaminan mutu, baik program kegiatan akademik maupun non akademik.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan universitas.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.
- 4) Melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu dari setiap unsur dan atau satuan organ universitas.

Unit pengkajian dan pengembangan sistem mutu dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, bereskrepsi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh universitas dengan sangat baik. Unit-unit penjamin mutu ini bekerjasama dengan tim Unit Pelaksana Teknis

Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-PTIK) di bawah koordinasi Wakil Rektor IV untuk peningkatan *Learning Outcome* (LO).

Tujuan utama dari pengendalian mutu pembelajaran ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya. Sistem pengendalian mutu pembelajaran di UNP meliputi proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.

Pendekatan yang digunakan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran dituangkan dalam dalam buku panduan akademik UNP. Sistem proses pembelajaran dimulai dari penyusunan kurikulum; penyusunan perangkat pembelajaran, termasuk penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan, materi pembelajaran, dan evaluasi; pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Panduan akademik ini selanjutnya dijabarkan oleh BPMI dengan menetapkan berbagai prosedur mutu (SOP) pembelajaran, diantaranya **SOP No BSPK-01** tentang penyusunan kurikulum, **SOP No BSPK-04** tentang penyusunan silabus, **SOP No BSPK-05** tentang pelaksanaan perkuliahan, **SOP No BSPK-11** tentang pelaksanaan evaluasi hasil belajar, **SOP No BSPK-23** tentang penyusunan skripsi, **SOP No BSPK-22** tentang Pelaksanaan PL Kependidikan, dan **SOP No BSPK-23** tentang pelaksanaan ujian skripsi.

Pengendalian mutu proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan standar mutu pembelajaran, yang meliputi standar mutu perencanaan perkuliahan, standar mutu pelaksanaan perkuliahan, dan standar mutu pelaksanaan evaluasi perkuliahan.

Pengendalian standar mutu terkait perencanaan sumber daya pembelajaran mencakup pengendalian standar mutu silabus, standar mutu satuan acara perkuliahan (SAP), dan standar mutu sarana prasarana perkuliahan. Dalam standar mutu perencanaan tersebut telah diatur bahwa sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai, semua mata kuliah yang ditawarkan, jadwal perkuliahan, dosen pengampu, dan ruang kuliah sudah ditentukan dan sudah di-*upload* ke SIA UNP. Semua sarana dan prasarana perkuliahan, seperti ruang kuliah, mobiler, dan media atau peralatan pembelajaran sudah tersedia secara lengkap, aman, dan nyaman. Perangkat pembelajaran yang mencakup silabus, SAP, materi ajar, dan rencana evaluasi telah disusun sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh dosen, dan telah digandakan oleh jurusan/program studi. Dalam

silabus dan SAP yang disusun telah tergambar seluruh kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama satu semester, termasuk di dalamnya adalah kompetensi yang akan dicapai, strategi, metode, dan media yang akan digunakan, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, materi ajar yang diperlukan, serta teknik evaluasi dan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

Pengendalian standar mutu pelaksanaan pembelajaran mencakup pengendalian tentang kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa, ketepatan waktu dimulai dan diakhirinya pelaksanaan perkuliahan, ketersediaan silabus bagi setiap mahasiswa, kesesuaian materi pembelajaran dengan silabus, pengisian batas perkuliahan setiap kali pertemuan, dan jumlah pertemuan perkuliahan yang dilakukan oleh UPMI.

Pelaksanaan pengendalian proses pembelajaran ini dilakukan dengan cara memonitoring dan mengevaluasi perencanaan pembelajaran, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, memonitoring dan mengevaluasi penilaian hasil belajar. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembelajaran, sebelum perkuliahan semester dimulai, Tim GPMI fakultas dan jurusan/program studi memastikan bahwa perangkat pembelajaran ini telah siap, terutama silabus/RPS dan SAP setiap mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut telah digandakan sebelum perkuliahan dimulai. Selain kesiapan dari segi perangkat pembelajaran, Tim GPMI fakultas dan jurusan/program studi juga memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana perkuliahan, seperti ruang kuliah dan laboratorium, serta media dan peralatan perkuliahan yang akan digunakan sudah siap sesuai standar yang telah ditentukan.

UNP memiliki standar mutu proses pembelajaran terkait dengan syarat-syarat kekelulusan dan dilakukan secara konsisten. Pengendalian mutu evaluasi perkuliahan atau penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup pengendalian tentang ketepatan jenis evaluasi yang digunakan, yang berupa ujian tulis, pemberian tugas, dan pengamatan dosen; kelengkapan evaluasi (evaluasi tengah dan akhir semester); ketepatan waktu pelaksanaan ujian, di mana ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke 8, dan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke 16; persyaratan untuk mengikuti ujian (mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa yang kehadirannya mengikuti perkuliahan minimal 80%); penetapan persyaratan dan kriteria kelulusan mahasiswa; dan ketepatan waktu dosen meng-*upload* penilaian hasil belajar mahasiswa ke dalam portal SIA UNP sebagaimana waktu yang telah ditentukan (tiga minggu setelah ujian akhir semester berakhir).

Dalam kaitannya dengan pengendalian pelaksanaan pembelajaran, setiap kali pertemuan, dosen diharuskan mengecek kehadiran mahasiswa dan mengisi batas perkuliahan; kehadiran dosen dan mahasiswa dimonitor setiap kali pertemuan oleh staf akademik yang ditugaskan. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan empat kali dalam satu semester, yaitu pada minggu ke-2, minggu ke-6, minggu ke-10, dan minggu ke-12. Evaluasi pada minggu kedua dilakukan untuk mengecek ada tidaknya permasalahan yang menyangkut kelancaran pelaksanaan perkuliahan. Sedangkan evaluasi pada minggu ke 6, ke 10, dan ke 14 dilakukan untuk mengecek jumlah kehadiran dosen dalam pelaksanaan perkuliahan. Jika ditemukan dosen yang pelaksanaan perkuliahannya belum sebagaimana mestinya, maka dosen yang bersangkutan akan diberi peringatan secara tertulis untuk melengkapi pelaksanaan perkuliahannya. Untuk memperoleh sejumlah informasi yang terkait dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan dosen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran, sebelum akhir semester diminta umpan balik dari mahasiswa tentang pembelajaran yang dilakukan dosen, dengan menggunakan angket secara manual atau *online*.

Hasil evaluasi mahasiswa tersebut diolah dan disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan perkuliahan selanjutnya. Setiap bulan dan setiap akhir semester jurusan/program studi diminta untuk memberikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan pembelajaran dosen ke fakultas, dan setiap akhir semester, fakultas merekap pelaksanaan pembelajaran masing-masing dosen dari setiap program studi, lalu melaporkannya secara tertulis ke universitas. Hasil laporan pelaksanaan perkuliahan, hasil monitoring dan evaluasi perkuliahan, umpan balik dari mahasiswa, dan hasil penilaian kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti oleh pimpinan universitas dan fakultas, dan dijadikan bahan untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala yang dapat berupa ujian, pemberian tugas, dan pengamatan dosen. Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar mahasiswa. Evaluasi hasil belajar berupa ujian tulis dilaksanakan dalam ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program. Ujian tengah semester dilakukan setelah 7 kali perkuliahan tatap muka atau dilaksanakan pada minggu ke 8, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah 14 kali perkuliahan tatap muka, atau dilakukan pada minggu ke 16. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa yang kehadirannya mengikuti perkuliahan

minimal 80%. Ketentuan 80% ini tertuang dalam Peraturan Akademik UNP tahun 2011 dan disempurnakan pada **Peraturan Akademik 2015 pasal 47 ayat 4,5 dan 6**.

Untuk mata kuliah MKU dan MKDK, soal ujian dibuat oleh tim pengampu mata kuliah tersebut, dan ujiannya dilaksanakan secara bersama pada hari dan waktu yang sama. Hal ini dimaksud agar setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut mendapatkan perlakuan yang sama. Nilai akhir mahasiswa dalam sebuah matakuliah adalah gabungan dari nilai tugas dan aktivitas, nilai UTS, dan nilai UAS. Ujian akhir Program Studi berbentuk Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi. Nilai suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf yang merupakan konversi dari nilai angka. Bentuk konversi Nilai mata kuliah dituangkan dalam Peraturan Akademik 2011 dan disempurnakan dengan **Peraturan Akademik tahun 2015 Pasal 25 ayat 2** sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12. Sebaran Nilai dan Mutu

Niali Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu
85 s.d. 100	A	4,0	Dengan Pujian
80 s.d. 84	A-	3,6	Sangat Baik Sekali
75 s.d. 79	B+	3,3	Baik Sekali
70 s.d. 74	B	3,0	Baik
65 s.d. 69	B-	2,6	Cukup Baik
60 s.d. 64	C+	2,3	Lebih dari Cukup
55 s.d. 59	C	2,0	Cukup
50 s.d. 54	C-	1,6	Kurang Cukup
40 s.d. 49	D	1,0	Kurang
≤ 39	E	0,0	Gagal
-	T	-	Tertunda

Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan pada akhir semester 2 dan pada akhir semester 4. Berdasarkan evaluasi kemajuan belajar tersebut, Dekan, atas usul ketua Program Studi, member peringatan secara tertulis kepada mahasiswa yang

terancam dikeluarkan. Mahasiswa yang telah melampaui batas studi seperti yang ditentukan dan tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, dikeluarkan dari UNP oleh rektor atas usul dekan.

Khusus untuk mata kuliah Tugas akhir (skripsi/teisi/disertasi), UNP memiliki panduan penulisan Tugas Akhir dan telah menetapkan standar SOP tersendiri. Standar mutu **SOP dengan kode BSPK-23** mengatur tentang SOP Tugas Akhir yang terdiri dari penyusunan tugas kahir, pelaksanaan ujian, pengajuan dan bimbingan skripsi, dan SOP ujian tugas akhir. UNP memiliki pedoman pelaksanaan tridarma PT, serta pengintegrasian kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kedalam proses pembelajaran, serta dokumen-dokumen pendukung.

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Padang dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Rektor UNP dalam bentuk Pedoman Akademik, Rencana Induk Penelitian, Panduan Penelitian dan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

Pengintegrasian kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam kebijakan yang tercantum di dalam Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan diperkuat dengan SK Rektor Nomor 201/UN3535/AK2012 tentang etika penelitian dan SK Rektor Nomor 049/UN35/AK/2014 tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian. Dalam panduan tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari hasil penelitian. Selain itu, kebijakan ini juga terdapat dalam Peraturan Akademik dengan SK. No. 39/UN35/AK/2012 dan SK. No.86/UN35/AK/2015 dengan lampiran berupa Pedoman Akademik UNP. Pedoman Tentang Integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi UNP menegaskan bahwa:

- 1) Penelitian yang dilakukan dosen UNP, terutama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian menghasilkan produk utama atau produk tambahan dalam bentuk buku, bahan ajar, model, prototipe dan HaKI yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi/tesis (penelitian payung). Dalam pelaksanaan hibah kompetisi/institusional

hasil penelitian tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran karena merupakan indikator utama hibah.

- 3) Dosen diwajibkan mengaplikasikan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban ini tertuang dalam persyaratan proposal pengabdian kepada masyarakat proposal dengan dana BOPTN dan dana DIPA UNP.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk dosen dan mahasiswa, serta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diatur dalam panduan yang telah disiapkan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bagian Kemahasiswaan BAAK. Panduan penelitian dan pengabdian tersebut diturunkan dari Panduan DP2M Dikti edisi IX dan revisi tahun 2016 menjadi edisi X, Dokumen Hibah, dan Rencana Induk Penelitian UNP. Panduan penelitian yang diturunkan tersebut dapat diakses melalui Website: <http://lp2m.unp.ac.id/>

Berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dilaksanakan secara konsisten oleh sivitas akademika UNP, di mana pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu Internal UNP. Sedangkan implementasi hasil-hasil kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi hasil-hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah dikemukakan di atas juga sudah dilaksanakan oleh para dosen. Universitas Negeri Padang menyadari betul akan perlunya pembelajaran yang berbasis penelitian dan berpusat pada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan dalam rangka mencapai visi menjadi universitas unggul di kawasan Asia Tenggara, sebagaimana yang dinyatakan di dalam visi UNP.

e. Suasana Akademik

Universitas Negeri Padang secara terus menerus menjamin keberlangsungan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sebagaimana yang tercantum di dalam **Statuta Universitas Negeri Padang tahun 2000 Pasal 20 ayat 1 poin (e) dan disempurnakan dalam statuta UNP tahun 2014 Bab V pasal 19**. Jaminan ini terdapat dalam dokumen formal yang terdiri dari otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh **Peraturan Rektor 92 /UN35/AK/2013** tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Di Lingkungan Universitas Negeri Padang, kegiatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di tingkat universitas, fakultas, dan program studi, yang masing-masing memiliki kesempatan yang sama (hak dan kewajiban), serta dilakukan melalui suatu pengorganisasian yang resmi dan dipertanggungjawabkan.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan spirit dalam dinamika kehidupan kampus, di mana satu dengan lainnya memiliki keterkaitan sebagai proses untuk tercapainya apa yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Negeri Padang juga sangat menyadari bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan basis untuk muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan baru, baik yang berupa nilai, norma, atau teknologi. Jika diberlakukan pembatasan terhadap kebebasan akademik, maka inisiatif atau ide maupun gagasan yang brilian akan sulit atau bahkan mungkin tidak akan pernah muncul.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kebebasan akademik dalam hal ini lebih dimaknai bahwa dosen (sivitas akademika) memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.

Aktifitas kebebasan akademik di lingkungan UNP meliputi:

- 1) Pengajaran. Meskipun ada standar yang ditentukan di dalam penyusunan RPS dan SAP, namun dosen tetap diberi kebebasan di dalam mengembangkannya, memilih dan menentukan bahan ajar, model atau metode pembelajaran, dan evaluasinya, sesuai dengan keahlian/profesi serta bidang disiplin keilmuannya.
- 2) Penelitian. Setiap dosen diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dan disiplin keilmuan yang dimiliki dengan melakukan kegiatan baik secara mandiri maupun kolaborasi dalam hal penelitian, penulisan buku ajar atau buku teks, penulisan artikel atau karya ilmiah lainnya, atau penyampaian ide/gagasan keilmuan dalam bentuk kegiatan interaktif dengan kalangan sivitas akademik lainnya (mahasiswa, dosen maupun kalangan se-profesi keilmuan).
- 3) Pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen diberi kebebasan untuk

mengimplementasikan hasil-hasil penelitian atau pemikirannya dalam kegiatan pengabdian masyarakat, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan dosen atau program studi lain.

- 4) Pelaksanaan kebebasan akademik. Pada tingkat universitas pelaksanaan kegiatan kebebasan akademik bisa dalam bentuk kepanitiaan di tingkat universitas atau dilaksanakan oleh institusi/lembaga/pusat kajian yang kedudukannya berada di tingkat universitas. Pelaksanaan juga dapat dilakukan pada tingkat fakultas dan program studi dalam bentuk penyelenggaraan kepanitiaan atau dilaksanakan oleh institusi/lembaga/pusat kajian atau laboratorium yang tingkat kesetaraannya sama dengan fakultas atau program studi tersebut.
- 5) Dukungan. Universitas, fakultas, dan program studi memberikan bantuan, dorongan dan atau fasilitator terhadap tenaga pengajar (dosen) atau pihak lain yang dianggap layak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- 6) Dokumentasi. Semua kegiatan dan hasil kegiatan kebebasan akademik tersebut terdokumentasi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi tergantung di mana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya di dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi, sesuai dengan kaidah keilmuan, norma, dan nilai; serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan kebebasan mimbar akademik, UNP sangat berkomitmen dan telah membuktikan penghormatan akan kebebasan mimbar akademik, di mana hal ini telah menjadi tradisi yang dikembangkan terus oleh kepemimpinan universitas, dan telah diketahui masyarakat luas mengenai kepekaan UNP dalam menyuarakan kebenaran melalui kebebasan mimbar kampus. Kegiatan kebebasan mimbar akademik dalam pelaksanaannya dapat meliputi:

- 1) Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam forum Dies natalis dan Wisuda.
- 2) Seminar, *Workshop*, Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek).
- 3) Diskusi Bedah Buku.

- 4) Presentasi hasil penelitian dosen.
- 5) Seminar proposal penelitian.
- 6) Publikasi dalam forum diskusi, media *online*, prosiding, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
- 7) Presentasi karya ilmiah yang dilakukan melalui kerjasama antar perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, lembaga profesi maupun, dengan instansi pemerintah atau instansi lainnya.
- 8) Menghadirkan para ahli/pakar/tokoh masyarakat/dosen tamu/peneliti ahli sampai kepada pemerhati dan pejabat negara.
- 9) Pelaksanaan mimbar akademik dilaksanakan secara terus menerus baik secara rutin maupun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akademis.
- 10) kebebasan mimbar akademik untuk tingkat universitas bisa dalam bentuk kepanitian di tingkat universitas atau dilaksanakan oleh institusi/lembaga/pusat kajian yang kedudukannya berada di tingkat universitas. Hal ini juga berlaku pada tingkat fakultas dan program studi dengan tingkat kesetaraannya sama.

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau menurut metode keilmuan, dan budaya akademik. Otonomi keilmuan dalam mempertahankan kebenaran ilmiah merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan tersebut dalam mengungkapkan, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu yang berkelanjutan dan bebas nilai.

Implementasi otonomi keilmuan di lingkungan UNP telah dilaksanakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan memberikan ruang otonomi keilmuan kepada fakultas, program studi, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Kajian, Laboratorium, Media Publikasi seperti Jurnal ditingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi, maupun jurnal yang diterbitkan oleh Pusat-Pusat Kajian, Lembaga Penelitian serta media *on-line*. Fakultas dan Program Studi dalam upaya melaksanakan kebebasan mimbar diberi otonomi yang luas untuk mengembangkan bidang keilmuan yang diampu sebagai upaya peningkatan kemampuan pengembangan keahlian serta daya saing keilmuan. Kegiatan dan hasil kegiatan otonomi keilmuan terdokumentasikan di tingkat universitas (bila kegiatan itu dilaksanakan univesitas), di

tingkat fakultas (bila kegiatan itu dilaksanakan di tingkat fakultas) dan di tingkat program studi (bila kegiatan itu dilaksanakan di tingkat program studi). Pelaksanaan otonomi keilmuan juga dilakukan melalui media (jurnal/majalah) yang pelaksanaannya dilakukan baik di tingkat universitas (termasuk institusi di tingkat universitas), fakultas sampai pada tingkat Program Studi dalam wujud jurnal profesi.

Dalam menjalankan mimbar akademik yang bebas, UNP tidak mentoleransi tindakan plagiasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010. Kemudian, diterjemahkan dalam Panduan Penyelenggaraan Penelitian UNP, khususnya mengenai etika penelitian dan kepengarangan yang dimuat pada buku Etika Penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian UNP dengan SK Rektor nomor 201/UN35/AK/2012. Selanjutnya, hal yang paling utama untuk menuju universitas unggul, maka UNP memerlukan wadah untuk melakukan diseminasi hasil riset sangat dibutuhkan. Hal ini mengharuskan UNP untuk selalu meningkatkan mutu dan hasil terbitan, baik jurnal, buku, dan sebagainya yang diterbitkan melalui lembaga penerbitan UNP yang dikenal dengan UNP Press.

Dengan adanya otonomi keilmuan dan kebebasan akademik serta mimbar akademik bukan berarti memunculkan ego sektoral dalam keilmuan, akan tetapi pada hakikatnya dengan adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan maka para insan akademik dapat berkarya secara optimal, karena kebijakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan mendorong para akademisi untuk mengemukakan ide/gagasan mereka, kemudian diberikan wadah (seminar, simposium, diskusi berkala dan lain-lain) untuk menguji gagasan atau ide mereka tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh UNP adalah memberikan wadah untuk berlangsungnya interaksi berbagai ilmu yang ada di dalam lingkungan UNP maupun di luar institusi UNP. Dialog antar disiplin ilmu seperti riset bersama atau kolaborasi riset antar disiplin ilmu dan juga riset bersama antara dosen dengan mahasiswa sudah diimplementasikan; begitu juga seminar atau simposium yang membahas topik tertentu dengan pembahas dari berbagai disiplin ilmu. Universitas Negeri Padang sangat menyadari bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh era globalisasi dan teknologi komunikasi menimbulkan dinamika sosial politik dan ekonomi yang tinggi, sekaligus juga memberikan peluang yang tinggi. Dengan kata lain globalisasi telah menimbulkan tantangan (*threat*) sekaligus peluang (*opportunities*). Hal ini menyebabkan beberapa aturan di UNP senantiasa disesuaikan dengan kondisi tersebut; termasuk dalam hal kebebasan

akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dibutuhkan dalam rangka mendukung berkembangnya para peneliti yang kreatif/inovatif yang dapat memunculkan gagasan atau ide/pengetahuan yang baru, sehingga bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan sosial di Indonesia, dan tentunya juga dapat bekerjasama atau sinergi dengan bidang ilmu yang lain maupun lembaga eksternal dalam rangka menyelesaikan masalah sosial tersebut.

UNP memiliki sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. Melalui berbagai kebijakan dan dukungan yang diberikan oleh universitas, fakultas, dan jurusan/prodi, serta dengan adanya dukungan teknologi informasi yang memadai sebagaimana yang telah dikemukakan di atas; sangat memungkinkan tumbuh dan berkembangnya budaya akademik yang kondusif, terjalannya kerja sama yang baik antara sivitas akademika UNP, serta diperolehnya pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa dalam meraih prestasi akademik yang maksimal. Sistem ini didukung oleh serangkaian kebijakan dan peraturan rektor yang diterapkan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Sistem pengembangan suasana akademik untuk meningkatkan akademik yang kondusif yang ditetapkan melalui kebijakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi untuk meraih prestasi akademik yang maksimal perlu di monitor dan dievaluasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain dampak positif, penggunaan TI dalam pengembangan budaya akademik juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi seluruh sivitas akademika UNP, terutama mahasiswa. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir dampak negatifnya, UNP membuat kebijakan pembatasan pengaksesan situs-situs yang kurang atau tidak bermanfaat bagi pembelajaran berdasarkan standar kebijakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo). Selain itu, penggunaan TI tersebut, dan juga penggunaan fasilitas yang lain agar bisa lebih efektif dan efisien, senantiasa dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dan evaluasi sistem TI dilakukan melalui survey dan laporan user. Hasil monitoring dan evaluasinya dimanfaatkan untuk perbaikan secara berkelanjutan.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penelitian merupakan aktivitas yang harus dilakukan dosen sesuai dengan tuntutan Tridarma Perguruan Tinggi. Manajemen penelitian sepenuhnya dikelola oleh Lembaga

Penelitian (Lemlit) UNP. Lemlit UNP merupakan sebuah lembaga penelitian yang sudah lama berdiri dan berkiprah di dalam berbagai bidang penelitian, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Lemlit UNP mempunyai 6 pusat penelitian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu (1) Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, (2) Pusat Penelitian Studi Wanita, (3) Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, (4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama, (5) Pusat Penelitian Mitigasi Bencana, dan (6) Pusat Penelitian Hukum dan HAM. Selain itu di UNP juga terdapat beberapa pusat studi atau pusat kajian seperti, Pusat Kajian Humaniora, Pusat Kajian Sosial, Budaya dan Ekonomi, Pusat Studi Sport Science, Pusat Studi Etnisitas dan Konflik, Pusat Studi Pembangunan Pedesaan dan Koperasi, Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produksi Nasional dan lain-lain. Lemlit juga dibantu oleh 10 orang tim pengembang, yang kesemuanya adalah guru besar dan/atau doktor. Hal ini membuat Lemlit UNP mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang dengan baik dan tentu saja memberi dampak yang positif terhadap kegiatan penelitian.

Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, Lemlit UNP telah melakukan serangkaian sosialisasi ke seluruh fakultas yang ada di UNP. Sosialisasi berkaitan dengan program, jenis penelitian yang ditawarkan berikut sumber dana, dan penjadwalannya. Sudah adanya mekanisme kontrol terhadap proses pelaksanaan penelitian, dan rumusan yang cukup baik tentang panduan melaksanakan penelitian, akan berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan peningkatan kualitas penelitian. Pengelolaan keuangan juga cukup transparan dan adanya deskripsi kerja untuk setiap staf, sehingga setiap staf mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan usia dosen/peneliti UNP yang sebagian besar masih muda dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, diharapkan kegiatan-kegiatan penelitian di UNP akan semakin baik secara kuantitas dan kualitas. Persentase dosen/peneliti yang berkualifikasi S2 dan S3 pun cukup besar sehingga peluang mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian yang berskala nasional dan internasional akan semakin besar.

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, dapat dimanfaatkan fasilitas peralatan yang ada di 15 buah Laboratorium dan Studio yang ada di Fakultas-Fakultas, Jurusan-Jurusan dan UPT-UPT di lingkungan UNP. Meskipun dirasakan masih kurang namun semua fasilitas ini dapat diandalkan dan dimanfaatkan untuk program-program kerja sama, dengan dukungan

pusat-pusat studi/kajian yang ada di semua fakultas. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, UNP melalui Lemlit telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi (pemerintah/PT di antaranya dengan kementerian Kehakiman/ Komnasham, kementerian negara Riset dan Teknologi, Bapedal Pusat dan Daerah, Tasmania University, Indiana University, Pemda/Bapeda Sumbar, Dinas Pendidikan, lembaga swasta, dll.

Secara umum jumlah penelitian dan sumber dana yang dilaksanakan UNP selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.13:

Tabel 2.13. Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional (2013 s/d 2017)

Jenis Penelitian		Sumber Dana APBN		Usulan Proposal
		Anggaran (Rp)	Lama Penelitian	
Skema Desentralisasi				
1	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Min. 100 juta	2-3 tahun	Feb - April
2	Penelitian Hibah Bersaing	50-75 juta	2-3 tahun	Feb - April
3	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100-150 juta	2 tahun	Feb - April
4	Penelitian Dosen Pemula	15-25 juta	1 tahun	Feb - April
5	Penel. Disertasi Doktor	50-60 juta	1 tahun	Feb - April
B. Skema Kompetitif Nasional				
1.	Penelitian Unggulan Strategis Nasional	500-1 miliar	2-3 tahun	Feb - April
2	Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional	150-200 juta	2-3 tahun	Feb - April
3	Penelitian Strategis Nasional	75-100 juta	2-3 tahun	Feb - April
4	Penelitian Kompetenis	100-150 juta	2-3 tahun	Feb - April
5	Riset Andalan PT dan Industri	300-500 juta	3 tahun	Feb - April
6	Penelitian Prioritas Nasional MP3EI	150-200 juta	2-3 tahun	Feb - April

Tabel 2.14. Sumber Dana Penelitian 2014 s/d 2017

No	Fakultas	2014			2015			2016			2017		
		Sumber Dana (dalam ribuan)			Sumber Dana (dalam ribuan)			Sumber Dana (dalam ribuan)			Sumber Dana (dalam ribuan)		
		PNBP	BOPTN	DIKTI	PNBP	BOPTN	Insinas	PNBP	BOPTN	Insinas	PNBP	DRM	Insinas
1	FBS	180000	579000	-	205000	747500		607500	571600	-	1507700	834100	
2	FE	710000	50000	-	670000	675000		625055	844800	-	1056000	765675	
3	FIK	130000	101000	-	515000	234000		675000	284800	-	2280000	580770	
4	FIP	241000	491000	-	395000	436500		1015000	885500	-	2221000	788020	
5	FIS	350000	699993	-	540000	619500		645000	781800	-	1375500	671500	
6	FMIPA	60000	1294000	-	232750	1380000	290000	227264	1505300	155000	3283000	1493822	152520
7	FT	340000	586000	-	260000	977000		555000	1059800	-	2286000	1143727	
8	FPP	-	-	-	-	-	-	94993	11600	-	314000	195000	
9	PASCA-SARJANA	220000		-	230000	-	-	266750	-	-			
	Jumlah	2231000	3800993	-	3047750	5069500	290000	4711562	5945200	155000	14323200	6472624	152520

Tabel 2.15. Keterlibatan Dosen dalam Penelitian 2014 s/d 2017

No	Fakultas	2014				2015				2016				2017			
		Jenjang Pendidikan				Jenjang Pendidikan				Jenjang Pendidikan				Jenjang Pendidikan			
		S2	S3	Guru Besar	Total	S2	S3	Guru Besar	Total	S2	S3	Guru Besar	Total	S2	S3	Guru Besar	Total
1	FBS	2	6	3	11	6	6	2	14	79	19	14	112	36	7	7	50
2	FE	1	6	5	12	7	4	4	15	82	19	7	108	25	9	3	32
3	FIK	2	2	2	6	3	2	3	8	96	12	2	110	32	20	2	54
4	FIP	6	4	3	13	6	1	3	10	91	42	10	143	36	21	2	59
5	FIS	6	6	3	15	7	3	3	13	66	24	5	95	23	10	6	39
6	FMIPA	11	10	5	26	12	8	5	25	52	35	2	89	52	30	3	85
7	FT	7	4	3	14	8	4	4	16	58	12	3	73	50	18	2	70
8	FPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1	13
8	Pascasarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	6	15	-	-	-	
	Jumlah	35	38	24	97	49	28	24	101	533	163	49	745	262	119	26	402

Tabel 2.16. Rekapitulasi Penelitian Fakultas untuk Tiap Jenjang Fungsional Dosen Tahun 2017

No	Fakultas	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Jumlah
1.	FIP	7	19	17	3	46
2.	FBS	10	9	9	3	31
3.	FMIPA	2	27	27	5	61
4.	FIS	3	6	14	6	29
5.	FT	2	15	27	8	52
6.	FIK	3	18	19	6	46
7.	FE	5	3	15	3	26
9.	FPP	2	2	4	1	9
Total		34	99	132	35	300

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penelitian yang dilaksanakan dosen UNP dan dengan sumber dana yang bervariasi. Untuk menyebarkan Karya Tulis Ilmiah staf pengajar UNP maupun staf pengajar Perguruan Tinggi lainnya, Lembaga Penelitian UNP saat ini mengelola sejumlah Jurnal Ilmiah yang bersifat ilmu murni (Non kependidikan) berikut ini.

- a. Jurnal Humanus, terbit 2 kali dalam satu tahun (periode Maret dan September).
- b. Jurnal Sainstek, terbit 2 kali dalam satu tahun (periode Maret dan September).
- c. Jurnal Penelitian Pendidikan, terbit 2 kali dalam satu tahun (periode Maret dan September)

Selain itu, jurnal yang dikelola universitas, program pascasarjana, dan fakultas saat ini adalah Forum :

- a. Pendidikan
- b. Jurnal Pembelajaran
- c. Pedagogik
- d. Jurnal Pendidikan dan Teknodidaktika.
- e. Demokrasi, terbit 2 kali dalam satu tahun.
- f. Tingkap, terbit 2 kali dalam satu tahun.
- g. Jurnal Economak, terbit 2 kali dalam satu tahun (periode Maret dan September).
- h. Jurnal Eksakta, terbit 2 kali dalam satu tahun (periode Maret dan September).
- i. Infotek, terbit 2 kali dalam satu tahun.

- j. Bahasa dan Seni, terbit 2 kali dalam satu tahun.
- k. *Sport Sains*, terbit 2 kali dalam satu tahun.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini, pengembangan kegiatan penelitian bersama antardosen dan antara dosen dengan mahasiswa perlu dibina, diarahkan dan digalakkan terus menerus oleh Universitas/ Fakultas/Jurusan. Dengan kegiatan ini suasana akademik yang muncul akan mendorong staf dan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan kapabilitas dalam bidang penelitian. Di samping itu, kemampuan staf dan mahasiswa dalam menulis publikasi ilmiah juga akan meningkat. Interaksi yang terjadi dalam kegiatan ini diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas bimbingan skripsi/TA mahasiswa. Peningkatan intensitas penelitian juga diharapkan memunculkan penelitian yang benar-benar berkualitas sehingga dapat diproyeksikan untuk dipatenkan atau didaftarkan ke HKI.

Mahasiswa sebagai objek dan sekaligus subjek pembelajaran merupakan potensi lain yang amat layak dibina dan dikembangkan untuk menghasilkan karya-karya kreatif, inovatif, dan aplikatif. Mereka perlu didorong dan difasilitasi dalam berekspresi dan berkompetisi, selain diperkaya dengan kemampuan yang mendukung untuk hal ini. Selama ini, peran mahasiswa telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian lainnya, namun perlu ditingkatkan dalam hal penemuan karya-karya ilmiah yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat.

Di samping beberapa hal di atas, kerja sama UNP dengan berbagai instansi (pemerintah dan non pemerintah) didukung sumber daya manusia yang teruji perlu dimanfaatkan lebih jauh terutama dalam hal penelitian dan program-program pengembangan. Sejauh ini tingkat partisipasi dosen dalam meneliti sudah melebihi 50%. Data terakhir penelitian tahun 2017 pada Tabel 2.16 terlihat bahwa ada 300 dari 1074 orang dosen yang terlibat dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, sesuai dengan komitmen perluasan mandat (*wider mandate*) yang mendasari pendirian UNP, secara kuantitatif 60% dari produk penelitian sudah memiliki agenda yang relevan dengan bidang keilmuan.

Berkaitan dengan kegiatan penelitian saat ini, ditemukan rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan dosen. Saat ini diharapkan penelitian yang dilakukan dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan diperlukan informasi yang akurat dan cepat kepada mahasiswa tentang agenda dan kesempatan dalam melakukan penelitian. Tingkat penelitian juga ditentukan oleh beberapa faktor

penting terutama masalah sarana dan pendanaan. Sejauh ini, hanya sebanyak 50% sarana penelitian yang dimiliki meskipun beberapa sarana berada pada basis fakultas dan jurusan. Aspek sistem informasi sebagaimana dijabarkan sebelumnya menekankan kepada adanya panduan tentang rancangan, prosedur pengusulan, pelaksanaan, implementasi untuk perorangan dan kelembagaan.

DP2M Dirjen Dikti Kemendiknas masih merupakan sumber utama penelitian dan pengabdian pada masyarakat di UNP. Dana yang dialokasikan dari anggaran UNP dan dari kerja sama dengan pihak eksternal juga belum cukup signifikan untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perencanaan ke depan mestinya memberikan penekanan kepada sumber dana alternatif untuk memajukan dan memperkaya keragaman penelitian di UNP.

Kunci utama pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ada pada kualitas usulan (proposal) yang diajukan. Secara kelembagaan ada beberapa aspek yang menjadi porsi universitas. Hal ini dimulai dari pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal, penulisan laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Hal ini sudah dilakukan, tetapi dalam intensitas yang sangat sedikit. Namun demikian, kecepatan waktu seleksi sudah dilaksanakan dengan sangat baik dengan rentangan 15 sampai dengan 21 hari. Dalam satu tahun rata-rata terdapat 100 s.d. 150 proposal yang diseleksi dan sekitar 75% diterima untuk didanai.

Lembaga penelitian melaksanakan pemantauan dan bantuan pelaksanaan pada setiap penelitian yang dilaksanakan. Saat ini pendanaan penelitian yang dilakukan oleh universitas memberikan penekanan kepada para peneliti junior. Pelaksanaan penelitian oleh peneliti junior ini memerlukan pendampingan yang dipandu oleh prosedur tertentu.

Output penelitian adalah dalam beberapa bentuk yaitu publikasi, diseminasi, pengabdian kepada masyarakat serta Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Paten. Sejauh ini belum sampai 30% dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan prosiding nasional. Selain itu belum sampai 5% dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding internasional. Meskipun demikian, 5% dari hasil penelitian sudah dipresentasikan dalam forum ilmiah nasional baik berupa simposium, seminar atau diskusi. Di tingkat lembaga Lembaga Penelitian secara terbatas sudah memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian. Masih sangat sedikit hasil penelitian yang mendapatkan perlindungan yang semestinya melalui pemberian hak atas kekayaan intelektual dan hak paten.

Ada bentuk lain yang sebenarnya memberikan identifikasi kepada hasil penelitian dan karya inovatif seperti berbagai bentuk penghargaan. Salah satu bentuk diseminasi hasil kajian dan penelitian secara personal adalah penerbitan buku oleh dosen yang bersangkutan. Universitas mengalokasikan dana yang cukup signifikan melalui UNP Press untuk memfasilitasi penerbitan buku oleh dosen. Setiap tahun sekitar 30 judul buku hasil karya inovatif dan penelitian dosen yang diterbitkan oleh penerbit milik universitas ini.

Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaannya dilakukan dosen di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNP. Sumber dana yang tersedia di antaranya adalah LPM UNP, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta beberapa pemerintah kabupaten/kota yang menawarkan kerja sama. Kegiatan dosen dalam hal ini meliputi pengabdian pada masyarakat yang terprogram, baik nasional maupun daerah, serta insidental (berdasarkan permintaan instansi/khalayak sasaran). Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dapat berbentuk voucher, *enterpreunership*, dan penerapan IPTEKS. Pada beberapa tahun terakhir telah dihasilkan sejumlah 61 kegiatan dengan dosen yang terlibat sebanyak 227 orang (23,69%). Kegiatan ini lebih banyak berbentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai segmentasinya.

Bagaimanapun, beberapa di antaranya merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan dosen. Di samping itu, kegiatan ini telah menghasilkan produk tepat guna terutama dari kegiatan yang dilakukan Fakultas Teknik. Selain itu, secara personal dan insidental, juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh beberapa dosen yang terlibat dalam kerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, seperti *The Asia Foundation*, *Partnership for Governance Reform*, *Research Triangle Institute* (RTI), *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta, langsung maupun melalui berbagai pusat kajian yang ada di lingkungan UNP, seperti yang dilakukan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE).

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat yang diinstruksikan oleh Kemendiknas melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP2M) tahun-tahun akhir ini adalah menekankan kepada pengabdian yang berbasiskan kepada penelitian. Data mutakhir dari UNP menunjukkan keterlibatan yang baik dari dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa tindak lanjut dari penelitian yang sesuai dengan keahlian dosen. Kegiatan pengabdian mengharapkan adanya keterlibatan mahasiswa. Meskipun demikian hanya 2 pelatihan metodologi Pengabdian kepada

Masyarakat yang sempat dilaksanakan per tahun. Pengabdian dilaksanakan melalui tahapan seleksi, seminar, pelaksanaan, pemantauan, seminar hasil, dan publikasi. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Data di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani mencapai proporsi 75%.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan secara **terprogram** (sudah direncanakan setiap tahun dalam RAKER Universitas) dan **insidental** (dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu). Hasil RAKER UNP yang telah dilaksanakan secara komprehensif, maka proses selanjutnya adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menerima informasi dan data tentang penyediaan dana PkM dan topik dari berbagai sumber. Baik dari Rektor UNP, Kemendiknas/Kementerian lain terkait, Institusi dalam negeri di luar Kemendiknas/Kementerian lain dan Institusi luar negeri, yang diperlukan oleh masyarakat untuk disampaikan kepada dosen ahli terkait dan mahasiswa agar PkM terlaksana sesuai dengan buku panduan baik waktu maupun target capaiannya.

Secara terprogram (1 tahun dan berkelanjutan), PkM diagendakan dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring, pelaporan dan tindak lanjut. PkM terprogram berawal dengan proses komunikasi dan informasi ke pada civitas akademika UNP dengan sistem *online* dan manual (surat tertulis) lengkap dengan agenda PkM selama 1 tahun anggaran. Tahapan berikutnya dosen dan mahasiswa melakukan survey/penelitian ke khalayak sasaran strategis (masyarakat sasaran) atau memanfaatkan hasil penelitian tahun sebelumnya sebagai dasar kajian masalah PkMnya, kemudian meneruskannya kedalam penyusunan usulan (proposal) PkM.

Setiap dosen dan mahasiswa yang melaksanakan PkM terprogram sudah diproses melalui hibah kompetisi tingkat UNP, Kemendiknas/Kementerian lain terkait, Institusi dalam negeri di luar Kemendiknas/Kementerian lain dan tingkat Institusi luar negeri. Tolok ukur semua PkM yang didanai adalah berbasis kualitas kerja (berbasis kinerja), artinya kriteria pendanaan harus memper jelas *output* dan *outcome* nya. Setelah dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM, maka diteruskan dengan pembuatan laporan akhir kegiatan PkM sesuai dengan jenis pendanaanya.

PkM insidental (PkM yang dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu), dilaksanakan pada saat terjadi bencana seperti banjir, gempa bumi atau tanah longsor yang melanda daerah sekitar

wilayah Propinsi Sumatera Barat dan bencana nasional. Dosen bersama mahasiswa melaksanakan PKM insidental tersebut dengan membantu meringankan beban para korban dengan sumbangan material dan tenaga. PkM insidental dapat juga dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan sumber dana dari pemerintah tingkat Kemendiknas/Kementerian lain terkait, Institusi dalam negeri di luar Kemendiknas/Kementerian lain dan Institusi luar negeri melalui LPM UNP.

Secara administratif, dokumentasi dan pendataan, semua PkM terprogram dan insidental terinventarisasi dengan baik dalam data elektronik dan data fisik laporan lengkap LPM UNP (laporan akuntabilitas kinerja institusi atau LAKIP LPM UNP). Akhirnya setiap dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan PkM, diterbitkan surat pernyataan melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua LPM dan menerbitkan (publikasi ilmiah) artikel PkM kedalam Jurnal *Suluh Bendang, ISSN 1411-6960*, terbitan LPM UNP.

4. Kerjasama

Sesuai dengan Visi dan Misinya, UNP telah menjalin banyak kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga, seperti Perguruan Tinggi, SLTA, Perusahaan, LSM dan lain sebagainya. Dari segi pendanaan, UNP melalui pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *World Bank* dalam program IMHERE, *Islamic Development Bank (IDB)*, Pertamina, dan lain sebagainya. Dari IMHERE, UNP memperoleh dana sekitar 10 Milyar Rupiah, melalui IDB sekitar 350 Milyar Rupiah, dan melalui Pertamina mendekati 3 milyar rupiah.

Berikut adalah daftar lengkap kegiatan kerjasama yang berpotensi menghasilkan pemasukan bagi Universitas Negeri Padang dalam kegiatan kerja sama.

Tabel 2.17. Beberapa Kegiatan Kerja sama UNP dengan Institusi Dalam Negeri Yang Berimplementasi pada Pendapatan UNP

No.	MITRA KERJA SAMA	NAMA KEGIATAN	Instansi
1	Bank Mandiri Syariah	Sewa Ruang Kantor	BUMN
2	Bank BRI	Beasiswa dan kegiatan-kegiatan seminar dan ekstra kurikuler	BUMN
3	Bank BNI	Beasiswa dan kegiatan-kegiatan seminar dan ekstra kurikuler	BUMN

No.	MITRA KERJA SAMA	NAMA KEGIATAN	Instansi
4	PT Pos Indonesia	Sewa ruang kantor	BUMN
5	Bank Indonesia	Beasiswa	Pemerintah
6	Bank Lipo	Beasiswa	Swasta
7	PT Semen Padang	Beasiswa	BUMN
8	Kemendikbud	Hibah	Pemerintah
9	Dikti	Hibah	Pemerintah
10	Dirjen PLS PAUDNI	Pengembangan SDM PAUDNI	Pemerintah
11	PT Pertamina	Beasiswa	BUMN
12	Dirjen Pendidikan Kejuruan	Pengembangan SDM	Pemerintah
13	Pemda Kota Padang	Pengembangan SDM	Pemerintah
14	Pemda Propinsi Sumbar	Beasiswa dan pengembangan SDM	Pemerintah
15	Bank Nagari	Beasiswa	BUMD

Kerjasama UNP dengan USAID telah diikuti oleh puluhan dosen UNP yang menjadi asesor maupun instruktur penyebaran praktik yang baik dalam pendidikan bagi guru-guru pendidikan dasar dan menengah di seluruh Sumatera Barat. Kerjasama UNP dengan *World Bank* menghasilkan suatu kegiatan massal berupa sosialisasi Wahana Praktik yang Baik (WAPIK) bagi lebih dari 50 pendidik di Sumatera Barat.

Sampai saat ini, terdapat sebanyak 100 kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga di dalam negeri dan 15 lembaga di luar negeri yang sudah dijalin. Jenis dan mitra kerjasama tersebut dapat dilihat seperti Tabel 2.18 dan Tabel 2.19.

Tabel 2.18. Daftar Kerja Sama UNP dengan Instansi Dalam Negeri

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
1	Akademik Kebidanan Lenggogeni Padang	Penggunaan perpustakaan	2011	2016	Peminjaman buku bagi mahasiswa Akbid Lenggogeni

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
2	Gubernur Kepulauan Riau	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2012	2017	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan
3	Universitas Andalas	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2012	2017	Pengembangan SDM, penelitian dan publikasi PM, ICT
4	Universitas Negeri Gorontalo	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2012	2017	Pengembangan SDM, penelitian dan publikasi PM, ICT
5	Pemerintah kota Pariaman	Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian	2012	2017	Pengabdian Masyarakat dan Penelitian
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian	2012	2017	Pengabdian Masyarakat dan Penelitian
7	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Pengembangan SDM dan IPTEKS dan penelitian	2012	2017	Pengabdian Masyarakat dan Penelitian
8	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara	Meningkatkan kualitas SDM, Penelitian dan Penerapan IPTEK	2013	2018	Pengabdian Masyarakat dan Penelitian
9	LPMP Prov. Sumbar	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2013	2018	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
10	Pemkab Solok	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2013	2018	Pendidikan dan Pelatihan dan pengembangan SDM
11	Yayasan Alifah Padang	Penggunaan Perpustakaan	2013	2016	Peminjaman buku
12	Universitas Negeri Semarang	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
13	Bupati Padang Pariaman	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Melaksanakan Akademik Komunitas yang dilaksanakan disana
14	Bupati Musi Banyuasin	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Melaksanakan Akademik Komunitas yang dilaksanakan disana
15	Bupati Kerinci	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Melaksanakan Akademik Komunitas yang dilaksanakan disana
16	Walikota Sawahlunto	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Melaksanakan Akademik Komunitas yang dilaksanakan disana
17	Bupati Lahat	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Melaksanakan Akademik Komunitas yang dilaksanakan disana
18	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Program Beasiswa	2014	2018	Program Beasiswa
19	UNIMED	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan
20	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Jasa Perbankan	2015	2018	Pengelolaan Rekening Operasional BLU UNP
21	IPDN	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2020	Dosen UNP mengajar di IPDN

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
22	Polda dan BNN Sumbar	Pengembangan SDM & Penanggulangan Kamtibmas & Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba ((P4GN)	2015	2020	Pengembangan SDM & Penanggulangan Kamtibmas & Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba ((P4GN)
23	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2020	Pelaksanaan seminar ² yang diundang dosen FIS a.n. Dr. Akmal, SH, M.SI
24	SMK Nasional	Pelaksanaan Magang di perpustakaan	2015	2019	Uji Kompetensi siswa magang yang telah selesai magang
25	SMK Indonesia Raya Batang Anai	Pelaksanaan Magang di perpustakaan	2015	2019	Uji Kompetensi siswa magang yang telah selesai magang
26	SMK Nusatama Padang	Pelaksanaan Magang di perpustakaan	2015	2019	Uji Kompetensi prog. Keahlian Adm Perkantoran
27	Universitas Negeri Malang	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2018	Teacher Quality Improvement Program (TEQIP)
28	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelestarian Alam	2015	2018	Menanam, memelihara dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup
29	Sekolah Tinggi Teknik (STT) Ibnu Sina Batam	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2020	Pengembangan Profesi, Workshop dan pelatihan

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
30	Bank BTN	Jasa Perbankan	2015	2018	Pemanfaatan layanan Jasa perbankan untuk pendidikan, PPO dan Pengelolaan Rekening BLU UNP
31	Kab. Solok Selatan	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2018	Pengabdian Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan SDM
32	Bank BTN	Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan	2016	2019	Pengelolaan Rekening Operasional BLU UNP untuk Bidang III (Kemahasiswaan)
33	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Pelatihan, dan peningkatan sumberdaya manusia.	2016	2021	Penelitian Kebijakan kependudukan di Sumatera Barat a.n Dr. Indang Dewata, M.Si (Dosen FMIPA)
34	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Pelaksanaan pelatihan	2016	2021	Pelatihan peningkatan profesional guru mata pelajaran UN tk. SD, SMP, SMA/SMK di Rocky Hotel Padang
35	Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Program Beasiswa	2016	2017	Penyelenggaraan pendidikan program sarjana dan pascasarjana untuk tugas belajar
36	Politeknik Negeri Padang	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2017	Penggunaan perpustakaan

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
37	PT. Bukit Asam	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pelatihan dan peningkatan SDM
38	Pemprov Khusus Ibukota Jakarta	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pemberian Beasiswa 2 Orang)	2016	2021	Pemberian beasiswa UNP sebanyak 2 orang
39	12 LPTK	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
40	IAIN Imam Bonjol Padang	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
41	Universitas Islam Riau	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
42	Univ. Suska Riau	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
43	Bukopin	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Jasa layanan perbankan dan pemberian beasiswa

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
45	Mitratel	Pemberian Informasi melalui transceiver station	2016	2021	Sewa lahan utk pemenuhan kebutuhan coveragi menggunakan teknologi base transceiver station (BTS) di UNP
46	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
47	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
48	Kementerian Desa & PDT	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Mahasiswa akan dapat mengajar di daerah pedesaan, penelitian dan pengembangan SDM
49	PT. Bank Syariah Mandiri	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Asset dan Operasional BLU	2016	2019	Sewa lahan di FE dan bantuan jasa perbankan lainnya
50	ITS	Pembuatan Program BLU	2016	2021	Pelaksanaan Pengembangan sistem informasi BLU UNP (Aplikasi SIM Keuangan Proker, Simpeg, SIM RBA dan Simmonev)

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
51	Pemko Solok	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
52	Bank Indonesia	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan jasa perbankan	2016	2017	Pemberian beasiswa
53	SD Neg. 9 Surau Gadang Padang	Program Lingkungan Hidup dan Pengembangan SDM	2016	2019	Penelitian dibidang lingkungan hidup
54	ISI Surakarta	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
55	ISI Padang Panjang	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
56	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkungan Perguruan Tinggi
57	Bank Nagari	Pemanfaatan Produk Jasa Perbankan	2016	2019	Sedang berlangsung (Pengelolaan Rekening BLU), Kredit Pegawai, Host to Host dan Pengembangan Pendidikan

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
58	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Pengembangan SDM
59	Bank BTPN	Layanan Perbankan	2016	2021	Pensiunan UNP dapat melakukan transaksi di sana, pensiun atau peminjaman
60	SMK Tri Abdi Pembangunan	Pelaksanaan Uji Kompetensi	2016	2020	Uji Kompetensi siswa magang yang telah selesai magang
61	Pemprov Sumatera Barat	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2017	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
62	Dharma Andalas Training Centre (LSKPD-DATC)	Bimtek	2017	2020	Bimbingan Teknis/Workshop dan sosialisasi
63	BKKBN Pusat	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
64	BTN	Jasa Perbankan	2017	2020	Pemberian Kredit kepada Karyawan UNP
65	ITB	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
66	Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
67	Pemkab Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM
69	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM
70	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM
71	PT. CT. Corpora	Kerjasama Bisnis	2017	2019	Pemberian kuliah umum kepada mahasiswa tentang cara keberhasilan berbisnis oleh CT
72	Kajati Sumbar	Hukum perdata dan tata usaha negara dan tri dharma perguruan tinggi	2017	2019	Memberi bantuan hukum kepada UNP
73	Dinas Pendidikan Kota Padang	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2012	Pendidikan, pelaksanaan PSB Online

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
74	Bank Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Jasa perbankan dan pemberian beasiswa
75	Garuda Indonesia	SDM	2017	2019	Kerjasama di bidang pembelian tiket
76	STMIK Indonesia	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
77	PT.Radio Suara Padang	Pelaksanaan siaran langsung subuh mubarak	Sep-17	Dec-17	Wirid subuh setiap hari jumat pagi
78	Kota Sawah Lunto	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDM
79	UIN Sumatera Utara Medan	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
80	Kab. Pessel	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan pengembangan SDM
81	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag	Jaminan Produk Halal	2017	2022	Kuliah umum tentang produk halal
82	PT. TUV Rheiland Indonesia	Audit dan SDM	2017	2022	Pelaksanaan Audit di BPMI

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
83	Univ. Jambi	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait IPTEKS
84	UNAND	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2018	2023	Pemakaian labor FPP
85	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)	Bidang pendidikan	2018	2021	Seleksi Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Kepala Sekolah
86	Univ. Teknologi Malaysia	Tridharma Perguruan Tinggi	2012	2017	Pendidikan, Penelitian, Seminar, Pengembangan SDM
87	Queensland University of Technology, Australia	Tridharma Perguruan Tinggi	2013	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
88	Consurtium of Asia- Pasific Education Universities Malaysia	Tridharma Perguruan Tinggi	2013	2019	Bidang perubahan dalam pendidikan dan pelatihan guru serta pengabdian masyarakat
89	Indiana	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2017	Pendidikan, penelitian, seminar, akademik dan pertukanan dosen dan mahasiswa
90	The OHIO State University	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
91	Illinois	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
92	Ec-Council	Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2018	Pelatihan Security IT
93	The University of the Philippines	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
94	Finlad University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
95	Nanyang Technological University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian oleh dosen (Hamdi FMIPA)
96	Tianjin	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
97	SEAMEO	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM dan PPL mahasiswa

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
98	Universitas Sudan	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
99	Republic Polytechnic Singapur	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
100	Hiroshima University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM

Tabel 2.19. Kerja Sama dengan Lembaga Luar Negeri

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
1	Univ. Teknologi Malaysia	Tridharma Perguruan Tinggi	2012	2017	Pendidikan, Penelitian, Seminar, Pengembangan SDM
2	Queensland University of Technology, Australia	Tridharma Perguruan Tinggi	2013	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
3	Consurtium of Asia-Pasific Education Universities Malaysia	Tridharma Perguruan Tinggi	2013	2019	Bidang perubahan dalam pendidikan dan pelatihan guru serta pengabdian masyarakat
4	Indiana	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2017	Pendidikan, penelitian, seminar, akademik dan pertukaran dosen dan mahasiswa
5	The OHIO State University	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2019	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
6	Illinois	Tridharma Perguruan Tinggi	2014	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
7	Ec-Council	Tridharma Perguruan Tinggi	2015	2018	Pelatihan Security IT
8	The University of the Philipines	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
9	Finlad University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2016	2021	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
10	Nanyang Technological University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Penelitian oleh dosen (Hamdi FMIPA)
11	Tianjin	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
12	SEAMEO	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM dan PPL mahasiswa
13	Universitas Sudan	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2022	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM

No.	Perguruan Tinggi/ Instansi Mitra	Jenis	Periode Kerjasama		Relevansi Kerjasama
		Kerjasama	Mulai	Akhir	
14	Republic Polytechnic Singapur	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2020	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM
15	Hiroshima University	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	2017	2018	Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan SDM

Guna menjamin keberlanjutan kerjasama UNP dengan pihak mitra, UNP selalu melakukan *need assessment* terhadap mitra yang sedang melakukan kerjasama dengan UNP dan calon mitra kerja sama yang disasar oleh UNP. Di samping itu, UNP telah membuat SOP kerja sama dalam negeri dan SOP kerjasama luar negeri. SOP ini antara lain meliputi tata cara pelaksanaan kerja sama, tata cara penerimaan tamu, tata cara pengurusan ijin perjalanan dinas luar negeri, tata cara penandatanganan MoU, tata cara pelaksanaan seminar internasional, dan tata cara pembukaan program *dual degree*. SOP ini telah disosialisasikan baik di tingkat universitas maupun unit-unit yang lebih rendah.

Pengembangan kerja sama dalam negeri dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama bidang pendidikan dilakukan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah-sekolah menengah, serta dinas pendidikan kabupaten/kota.

Kerja sama bidang penelitian dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan badan/lembaga yang membutuhkan hasil penelitian dalam rangka pengambilan

keputusan, pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pengabdian yang dilakukan oleh dosen berupa pelatihan penelitian, pelatihan metode mengajar, pelatihan penggunaan media pembelajaran, dan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Pengabdian yang dilakukan mahasiswa adalah praktik kerja industri, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata.

Kegiatan kerja sama antara UNP dengan pihak mitra secara umum merupakan peningkatan pelayanan Tridharma perguruan tinggi, yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pihak UNP melakukan kerjasama dalam peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pihak mitra. Kerjasama dengan dinas pendidikan yang dilakukan oleh UNP, misalnya, peningkatan penguasaan bidang studi dan metode mengajar para guru mitra kerjasama. Dalam bidang penelitian, pihak UNP melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pihak mitra yang membutuhkan bantuan dalam mencari solusi bagi masalah yang dihadapi. Dalam bidang pengabdian, kerjasama yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia mitra sesuai dengan kebutuhan.

Di samping pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang bermanfaat bagi mitra UNP, kerja sama juga dapat memberikan masukan dana bagi UNP yang berasal dari masyarakat/mitra. Dana tersebut antara lain berupa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan atau perbankan yang dikelola bersama dengan UNP untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang disepakati bersama. Seluruh data terbaru dan kegiatan terkini dari kerja sama disajikan dalam *website* yang dimiliki oleh bagian kerja sama.

Kerjasama yang dibangun oleh UNP dengan mitra sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Manfaat kerjasama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mitra memperoleh pelayanan, fasilitas, dan dukungan dari UNP terkait dengan pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati bersama. Pelayanan yang diberikan pihak UNP antara lain berupa bantuan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dukungan peneliti untuk menemukan solusi dari masalah yang ditemukan, pengiriman mahasiswa untuk magang, dan pengabdian kepada masyarakat. UNP dapat mendharmabaktikan tridharma perguruan tinggi pada mitra

kerja. Dengan kata lain, pihak mitra mendapatkan apa yang diinginkannya terutama meningkatkan mutu sumber daya manusianya. Di lain pihak, UNP menerima insentif terhadap jasa yang diberikan. Di samping itu, pihak UNP berhak mendapatkan bantuan dana CSR dari mitra kerjanya serta bantuan-bantuan lainnya.

- Informasi kepuasan mitra dapat diperoleh antara lain pada saat Tim UNP melaksanakan monitoring pelaksanaan kerjasama dengan mitra, melalui alumni yang menjadi staf atau bekerja di mitra kerjasama, melalui informasi-informasi yang disampaikan pada web unp.ac.id. Informasi tersebut sangat membantu dalam memperbaiki, melanjutkan, dan melaksanakan kerjasama dengan mitra lainnya.

B. Sumber Daya

Bagian ini memaparkan kondisi sumber daya manusia UNP dan mahasiswa periode empat tahun terakhir (2014-2017). Sumber daya manusia terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.

1. Dosen

Kondisi Pendidik atau Dosen Universitas Negeri Padang dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terlihat pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20. Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2014 - 2017

No	Pendidikan	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1	S3	191	20,36	217	22,87	237	25,65	280	25,78
2	S2	678	72,28	691	72,81	658	71,21	791	72,83
3	S1	69	7,36	41	4,32	29	3,14	15	1,38
	Jumlah	938		949		924		1.086	

Berdasarkan Tabel 2.20 di atas, terlihat jumlah dosen tahun 2014 berjumlah 938 orang, tahun 2015 berjumlah 949 orang, tahun 2016 berjumlah 924 orang, dan tahun 2017 berjumlah 1.086 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah dosen dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan karena jumlah dosen yang memasuki purna tugas (pensiun) meningkat dan tidak diimbangi dengan penyediaan formasi baru dari pemerintah. Setelah tahun 2016 kondisi dosen atau staf pengajar UNP mulai mengalami kenaikan karena penyediaan formasi dan pengangkatan dosen baru. Baik

Dosen PNS maupun Dosen Tetap Non PNS.

Di samping itu, beberapa orang dosen juga mengikuti studi lanjut di dalam dan di luar negeri. Jumlah dosen yang mengikuti studi, jenjang, serta tempat studinya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21. Data Dosen yang Sedang Melakukan Studi Lanjut Tahun 2017

NO.	FAKULTAS	Tugas Belajar		Izin Belajar		TOTAL
		S2	S3	S2	S3	
1.	FIP	1	15	2	20	38
2.	FBS	-	6	1	11	18
3.	FMIPA	-	13	-	18	31
4.	FIS	-	11	1	12	24
5.	FT	-	20	1	8	29
6.	FIK	2	3	-	2	7
7.	FE	-	14	-	3	17
8.	FPP	1	2	1	5	9
Jumlah		4	84	6	79	173

Berdasarkan Tabel 2.21, terlihat Dosen atau Staf Pengajar UNP yang sedang melanjutkan studi ke S2 (Magister/Master) berjumlah 10 orang dan semuanya di dalam negeri, 163 orang menjalani pendidikan Program Doktor (S3) yang terdiri dari 40 orang di luar negeri dan 123 orang di dalam negeri. Sehubungan dengan itu, diperkirakan pada lima tahun ke depan, sebanyak 671 orang dosen UNP sudah berkualifikasi Strata 2 ditambah dengan 10 orang sedang menjalani pendidikan Strata 2. Selanjutnya diperkirakan lima tahun ke depan jumlah Dosen UNP berkualifikasi S3 (Doktor) akan meningkat secara signifikan (280 sudah berkualifikasi Strata 3 ditambah 163 orang yang sedang menjalani pendidikan Strata 3). Perbandingan pendidikan lanjut Strata 3 yang diikuti Dosen atau Staf Pengajar UNP di luar dan di dalam negeri tidak berimbang (40 orang di luar negeri dan 123 orang di dalam negeri). Pengembangan lima tahun ke depan seharusnya jumlah Dosen studi lanjut ke luar negeri semakin digalakan agar seimbang

jumlah lulusan dosen berkualifikasi Magister (S2) dan Doktor (S3) luar negeri dengan dalam negeri. Semua dosen memang sudah diwajibkan berkualifikasi minimal Magister (S2) dan UNP akan mewajibkan S3 bagi Dosen-dosen muda yang berumur dibawah dari 35 Tahun.

Latar belakang pendidikan dosen UNP, baik kependidikan dan non kependidikan dapat dilihat pada pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22. Perbandingan Dosen Berlatar Belakang Kependidikan dan Non Kependidikan

NO	FAK.	S1			S2			S3			TOTAL
		KP	NK	JML	KP	NK	JML	KP	NK	JML	
1	FIP	9	5	14	10 5	25	130	38	4	42	186
2	FBS	6	1	7	44	54	98	18	12	30	135
3	FMIPA			0	26	66	92	9	33	42	134
4	FIS	6	2	8	24	49	73	11	19	30	111
5	FT	1		1	42	89	131	18	8	26	158
6	FIK	7	1	8	49	19	68	19	4	23	99
7	FE			0	14	57	71	7	11	18	89
8	FPP	1	2	3	17	13	30	3	3	6	37
TOTAL				41			693			217	949

Tabel di atas menunjukkan bahwa dosen berkualifikasi kependidikan magister (S2) dan Doktor (S3) lebih banyak dibandingkan dengan non kependidikan. Kondisi ini disebabkan karena banyaknya program studi kependidikan yang diselenggarakan dibandingkan dengan prode kependidikan. Dan ini merupakan kekuatan bagi pengembangan kelembagaan, tanpa mengabaikan mandat utama UNP Proporsi bidang keilmuan dosen tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa kependidikan dan nonkependidikan sebagai perluasan mandat. Kualifikasi dan minat utama dosen juga dijadikan acuan bagi seluruh Fakultas/Jurusan untuk membagi tugas, sehingga kompetensinya sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan.

Di sisi lain, apabila dilihat lebih lanjut, kepangkatan dosen UNP dari tahun 2013 sampai dengan 2017 bervariasi. Gambaran jumlah dosen berdasarkan kepangkatan

terlihat pada Tabel 2.23:

Tabel 2.23. Jumlah Dosen Berdasarkan Kepangkatan

No	Golongan	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1	Gol IV	334	35,68	339	36,14	349	36,78	591	63,96	326	30,5
2	Gol III	602	64,32	599	63,86	600	63,22	333	36,04	743	69,5
Jumlah		936		938		949		924		1.069	

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 Dosen UNP bergolongan IV berjumlah 334 orang (35,68 %), tahun 2014 berjumlah 339 orang (36,14 %), tahun 2015 berjumlah 349 orang (36,78 %), tahun 2016 berjumlah 591 orang (63,96 %), dan tahun 2017 berjumlah 326 orang (30,5 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kenaikan pangkat Dosen UNP dari golongan III ke golongan IV dari tahun 2013 sampai 2014. Selanjutnya semenjak tahun 2015 sampai 2016 kenaikan pangkat dosen UNP dari golongan III ke golongan IV mengalami kenaikan. Apabila dibandingkan antara jumlah Dosen UNP yang bergolongan IV tahun 2017 dengan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 terdapat penurunan. Kondisi ini disebabkan karena sebagian dosen senior memasuki purna tugas (pensiun) dan meninggal dunia. Di sisi lain, Dosen UNP yang bergolongan III tahun 2013 berjumlah sebanyak 602 orang (64,32 %), tahun 2014 berjumlah 599 orang (63,86 %), tahun 2015 berjumlah 600 orang (63,22 %), tahun 2016 berjumlah 333 orang (36,04 %), tahun 2017 berjumlah 743 orang (69,5 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan pangkat dosen yang bergolongan III ke golongan IV sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena penambahan dosen baru dan sebagian dosen bergolongan III sedang melanjutkan studi.

Penerimaan dan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara demokratis dan transparan berdasarkan formasi yang tersedia. Selanjutnya formasi tersebut dikirim ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai formasi CPNS secara nasional. Formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dijatahkan kepada UNP disosialisasikan secara terbuka melalui koran daerah dan *website* UNP. Sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah

ditetapkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI melaksanakan seleksi secara serentak dan *online*. Setelah lulus seleksi dari Kemenristekdikti RI, selanjutnya dilakukan seleksi pembedaan oleh UNP. Proses penerimaan berlangsung secara terbuka dan transparan. Dosen dan Tenaga kependidikan setelah lulus seleksi diarahkan untuk mendukung rencana pengembangan jangka panjang jurusan dan program studinya masing-masing. Umumnya, pendanaan sekolah lanjut berasal dari BPPS dan Pemerintah Daerah serta bantuan dari UNP. Penyelesaian studi Dosen yang sedang S3 tersebut sangat variatif. Sebagian besar diperkirakan akan menyelesaikan studinya dalam waktu lima tahun mendatang.

Pemberdayaan Dosen yang baru selesai studi lanjut diarahkan untuk membina perkuliahan yang sesuai dengan spesialisasinya. Di samping itu, dosen tersebut ditugaskan untuk membimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa. Selain itu dosen juga didorong untuk meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum semua dosen tersebut diarahkan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara baik.

Sebagai perwujudan kualifikasi profesional pendidik, UNP mengirimkan nama dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk disertifikasi. Dosen UNP yang telah disertifikasi terlihat pada Tabel 2.24:

Tabel 2.24. Rekapitulasi Dosen UNP yang Telah Disertifikasi sebagai Pendidik Profesional Tahun 2013-2017

No	Tahun	Disertifikasi		Jumlah
		Sudah	Belum	
1	2013	717	219	936
2	2014	754	184	938
3	2015	839	110	949
4	2016	852	72	924
5	2017	853	59	912

Berdasarkan Tabel di atas, Dosen UNP tahun 2013 berjumlah sebanyak 936 orang dan disertifikasi sebagai pendidik profesional sebanyak 717 orang dan belum disertifikasi sebanyak 219 orang. Selanjutnya tahun 2014 dosen UNP berjumlah 938 orang, telah

disertifikasi sebanyak 754 orang dan belum disertifikasi sebanyak 184 orang. Tahun 2015, dosen UNP berjumlah 949 orang, telah disertifikasi sebanyak 839 orang dan belum disertifikasi sebanyak 110 orang. Tahun 2016 Dosen UNP berjumlah 924 orang, disertifikasi sebanyak 852 orang dan belum disertifikasi sebanyak 72 orang. Sedangkan tahun 2017 Dosen UNP berjumlah 912 orang, telah disertifikasi sebanyak 853 orang. Bertitik tolak dari uraian tersebut, dosen UNP yang belum disertifikasi sebagai pendidik profesional masih tersisa sebanyak 59 orang. Kondisi ini disebabkan karena belum terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (diantaranya: Dosen tersebut yang sedang melanjutkan studi dan baru diangkat).

2. Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2014-2017

No	Pend	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1	S3	1	0,23	1	0,21	0	0,00	0	0
2	S2	44	10,33	43	9,23	43	9,70	38	9,40
3	S1/DIV	118	27,70	147	31,55	143	32,27	147	36,38
4	DIII	42	9,86	56	12,02	55	12,41	50	12,37
5	DII	6	1,41	4	0,86	3	0,67	2	0,50
6	SLTA	196	46,01	197	42,27	185	41,76	157	38,86
7	SLTP	10	2,35	9	1,93	7	1,58	4	0,99
8	SD	9	2,11	9	1,93	7	1,58	6	1,48
Jumlah		426		466		443		404	

Berdasarkan Tabel 2.25, terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2015, tenaga kependidikan UNP yang berkualifikasi Doktor (S3) berjumlah 1 orang. Dari tahun 2016 sampai 2017, jumlah tenaga kependidikan yang berkualifikasi Doktor (S3) belum ada. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi Magister (S2), S1/DIV, dan DIII terus meningkat walaupun tidak terlalu banyak sejak tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2014, tenaga kependidikan yang berkualifikasi Magister (S2) berjumlah 38 orang (7,34%), tahun 2012 berjumlah 38 orang (7,93 %), tahun 2013 berjumlah 37 orang (8,41 %), tahun

2014 berjumlah 44 orang (10,33 %), tahun 2015 berjumlah 43 orang (9,23 %), tahun 2016 berjumlah 43 orang (9,2%), dan tahun 2017 berjumlah 38 orang (9,9%). Tenaga kependidikan berkualifikasi S1/DIV, tahun 2011 berjumlah 140 orang (27,03%), tahun 2012 berjumlah 141 orang (29,44 %), tahun 2013 berjumlah 122 orang (27,73%), tahun 2014 berjumlah 118 orang (27,70) dan tahun 2015 berjumlah 147 orang (31,55 %). Tenaga kependidikan UNP berkualifikasi DIII, tahun 2011 berjumlah 57 orang (11 %), tahun 2012 berjumlah 48 orang (10,02 %), tahun 2013 berjumlah 49 orang (11,14 %), tahun 2014 berjumlah 42 orang (9,86 %) dan tahun 2015 berjumlah 56 orang (12,02 %). Tenaga Kependidikan UNP berlatar belakang pendidikan SLTA, tahun 2011 berjumlah 238 orang (45,95 %), tahun 2012 berjumlah 219 orang (45,72 %), Tahun 2013 berjumlah 207 orang (47.05 %), tahun 2014 berjumlah 196 orang (46,01) dan tahun 2015 berjumlah 197 orang (42,27 %).

Di lain pihak, Tenaga kependidikan yang berkualifikasi SLTA, SLTP, dan SD terus menurun jumlahnya dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Kondisi ini disebabkan karena Tenaga Kependidikan yang ada telah mengikuti pendidikan Sarjana (S1), di samping UNP tidak menerima formasi CPNS berlatar belakang pendidikan SLTA, SLTP, dan SD.

3. Mahasiswa

a) Jumlah Mahasiswa

Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh UNP selama lima tahun terakhir, mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan program studi baru. Tabel 2.26 di bawah menampilkan jumlah mahasiswa UNP menurut jenjang program studi pada tahun 2014-2017.

Tabel 2.26. Jumlah Mahasiswa Menurut Jenjang Program Studi Keadaan Tahun 2013-2017

Jenjang Program Studi	Jumlah Mahasiswa			
	2014	2015	2016	2017
Strata tiga (S3)	204	294	378	358
Strata dua (S2)	1.760	2.822	2.830	3.560
Strata satu / Diploma empat (S1/D IV)	26.312	26.781	27.045	31.092

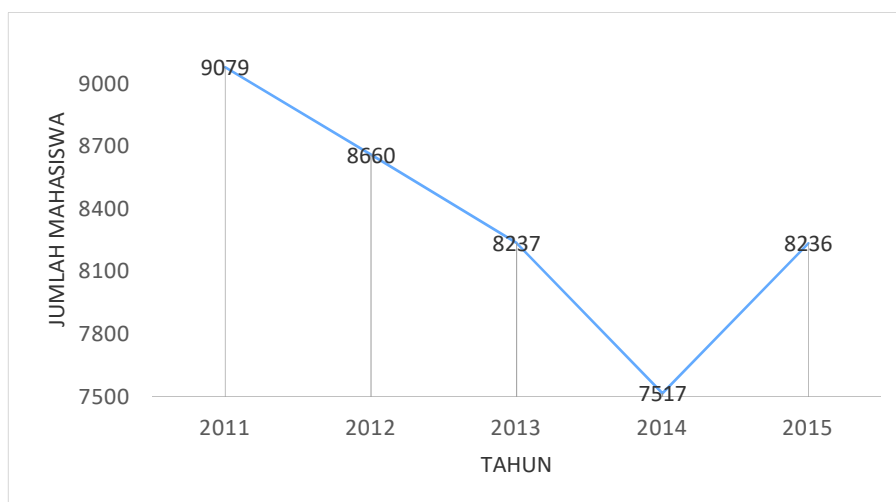
Jenjang Program Studi	Jumlah Mahasiswa			
	2014	2015	2016	2017
Diploma tiga (D3)	3.119	2.907	3.133	3.894
Diploma dua (D2)	566	710	836	141
Profesi	-	78	228	22
Jumlah	32.908	33.592	34.450	39.067

Rata-rata Mhs : 39.067

Keadaan : 2 Januari 2017

Jumlah rata-rata mahasiswa terdaftar selama lima tahun terakhir berada pada angka 30.067 mahasiswa yang terdaftar pada jenjang program studi S3, S2, S1, D4, D3, dan D2. Besarnya jumlah mahasiswa menunjukkan UNP membuka akses yang semakin luas untuk melayani keinginan masyarakat melanjutkan pendidikan. Secara berkelanjutan setahap demi setahap UNP memperluas akses dengan membuka program studi baru serta meningkatkan daya tampung. Peningkatan jumlah mahasiswa jenjang program S2 dan S3 setiap tahun selama lima tahun terakhir, menunjukkan pembukaan akses kepada masyarakat semakin meningkat secara signifikan. Lama penyelesaian studi mahasiswa periode 2014-2017 cenderung menurun, disebabkan oleh lama masa studi ditempuh mahasiswa semakin cepat.

Komitmen UNP membuka akses kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, tercermin dari jumlah peningkatan penerimaan mahasiswa baru selama lima tahun terakhir, seperti terlihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3. Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru Keadaan Tahun 2011-2015

b) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Mutu layanan akademik yang dilakukan oleh Universitas Negeri Padang tercermin dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara ketat, terbuka, dan mudah diikuti. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan (3) Seleksi Masuk Mandiri (SMM) yang dilaksanakan secara *online*. Alokasi penerimaan dari masing-masing jalur sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru jenjang program sarjana (S1) dengan rincian: SNMPTN 50%, SBMPTN 30%, dan mandiri 20%. Ketetapan penerimaan mahasiswa di Universitas Negeri Padang, terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27. Tingkat Ketetapan Mahasiswa yang Diterima Tahun 2014-2017 (SBMPTN)

Bidang	Tahun dan Persentase							
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Peminat IPA	33.899	4,6	11.254	4,5	34.436	9,9	13.326	8,85
Terima IPA	1.544		1.509		3.418		1.180	
Peminat IPS	98.717	4,1	31.435	4,6	83.949	5,8	34.806	8,17
Terima IPS	4.017		1.447		4.895		2.842	

Ketetapan penerimaan mahasiswa baru di UNP sangat baik. Rata-rata ketetapan penerimaan mahasiswa baru UNP dalam lima tahun terakhir adalah 4,7%, artinya dari 100 orang pelamar, yang dapat diterima antara 4-5 orang. Program studi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lebih ketat dari pada program studi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ketetapan penerimaan mahasiswa baru program studi bidang IPS dalam lima tahun terakhir adalah 4,4% dan untuk program studi bidang IPA adalah 5,1%. Hal ini sangat membanggakan karena minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Negeri Padang sangat tinggi.

c) Indeks Prestasi Akademik dan Lama Masa Studi Lulusan

Mutu layanan akademik juga dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan metode dan teknik pembelajaran yang efektif, menyenangkan, bermuara kepada peningkatan kreativitas mahasiswa, dan kemandirian mahasiswa

untuk mengembangkan diri. Upaya peningkatan mutu pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik seperti diskusi berkala staf pengajar pengampu mata kuliah, seminar pada tingkat program studi dan pelatihan staf pengajar.

Peningkatan mutu pembelajaran berdampak kepada indeks prestasi mahasiswa dan lama masa studi. Tabel di bawah ini menampilkan indeks prestasi dan lama masa studi mahasiswa lima tahun terakhir. Tabel 2.28 di bawah ini menampilkan indeks prestasi mahasiswa lima tahun terakhir.

Tabel 2.28. Rekapitulasi Rata-rata IPK Lulusan Tahun 2014-2017

Fakultas	Rata-rata IPK				
	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Fakultas Ilmu Pendidikan	3,31	3,34	3,37	3,40	3,36
Fakultas Bahasa dan Seni	3,34	3,36	3,38	3,41	3,37
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	3,30	3,32	3,35	3,39	3,34
Fakultas Ilmu Sosial	3,22	3,26	3,28	3,30	3,27
Fakultas Teknik	3,24	3,23	3,26	3,25	3,25
Fakultas Ilmu Keolahragaan	3,35	3,36	3,35	3,36	3,36
Fakultas Ekonomi	3,15	3,20	3,21	3,24	3,20
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan	3,38	3,39	3,35	3,44	3,39
Pascasarjana	3,49	3,49	3,50	3,56	3,51
Total	3,31	3,33	3,34	3,37	3,34

Seperti terlihat pada Tabel 2.28, terdapat peningkatan IPK lulusan UNP dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2014 misalnya rata-rata IPK lulusan 3,31, meningkat beberapa digit secara bertahap selama tiga tahun berikutnya, dan pada tahun 2017 berada pada posisi 3,37. Rata-rata IPK lulusan UNP selama empat tahun terakhir adalah 3,34.

Tabel 2.29. Rata-rata Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2014-2017

Jenjang Program Studi	Rata-rata Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Dalam Tahun				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Strata tiga (S3)	5,24	4,78	3,8	3,7	4,494
Strata dua (S2)	3,26	2,87	5,1	5	3,764
Starata satu (S1)	4,72	4,49	4,6	4,7	4,614
Diploma tiga (D3)	3,97	3,45	3,1	3	3,432

Rata-rata lama masa studi mahasiswa, terutama jenjang program Strata satu (S1), selama lima tahun terakhir dilihat dari rata-rata masa studi untuk seluruh jenjang program studi sangat memuaskan. Hal ini berarti terjadi percepatan rata-rata lama masa studi mahasiswa pada seluruh jenjang program studi.

d) Layanan Kemahasiswaan

Disamping meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Universitas Negeri Padang juga memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kecakapan hidup mahasiswa (*soft skills*), keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, dan keterlibatan dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik.

Universitas Negeri Padang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dengan berusaha mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber, berasal dari pemerintah maupun swasta. Rata-rata 20% dari jumlah mahasiswa UNP menerima beasiswa. Tabel 2.30 di bawah ini menunjukkan jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa periode 2014-2017.

Tabel 2.30. Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2014-2017

No	Nama Beasiswa	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Bidik Misi	3435	5035	5345	5205
2	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	1260	1236	111	1400
3	Biaya Pendidikan PPA	540	260	105	-
4	Supersemar	55	55	-	-
5	Semen Padang	12	10	6	7

No	Nama Beasiswa	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
6	Bank Nagari	160	200	200	104
7	BNI	-	20	-	-
8	BAZ Tanah Datar	-	-	-	7
9	BAZ Pariaman	-	-	-	48
10	BAZ Prov. Sumbar	322	-	38	192
11	BAZ Sibolga	-	-	-	5
12	Van Deventer - <i>Maas Sticing</i> (VDMS)	45	45	76	69
13	Bank Indonesia	40	-	40	40
14	Yayasan Toyota dan Astra	10	-	10	10
15	Beasiswa BTN	-	-	10	3
16	BBP BTN	-	-	-	-
17	Beasiswa PT Pelindo 2	-	-	-	31
18	BBP PT Pelindo 2	-	-	-	1
19	Beasiswa Bulog	-	-	-	31
20	BBP Bulog	-	-	-	1
21	Beasiswa Inna Indonesia	-	-	-	10
22	BBP Inna Indonesia	-	-	-	1
23	Beasiswa Is Anwar	-	-	-	20
24	BBP Is Anwar	-	-	-	1
25	Beasiswa Mandiri Syariah	-	-	-	23
26	Supersemar Unggulan	2	-	-	-
27	Pertamina	-	-	-	-
28	LIPPO	-	-	50	-
29	Badan Amil Zakat	-	-	23	39
30	ADIK Papua	-	-	23	39
	Jumlah	5.911	6.937	6.082	7.255

Jumlah mahasiswa UNP yang menerima beasiswa dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat baik. Keadaan tahun 2014 menunjukkan terdapat 5.911 mahasiswa penerima beasiswa, dan jumlah penerima beasiswa pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.255 penerima beasiswa. Jumlah mahasiswa UNP pada tahun 2017 mendekati angka 30.000 orang, jumlah ini menunjukkan lebih kurang 24,2% mahasiswa UNP menerima beasiswa. Sumber beasiswa, disamping dari program Bidik Misi, juga berasal dari dua puluh tujuh sumber pemberi beasiswa lainnya.

Di samping itu, Universitas Negeri Padang juga mengembangkan kecakapan hidup mahasiswa. Bentuk kecakapan hidup yang dilaksanakan, antara lain: kewirausahaan, latihan kepemimpinan, dan pembentukan sikap dan mental melalui kegiatan ketahanan malangan survival. Pengembangan kecakapan hidup mahasiswa dilaksanakan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNP didorong melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa. Organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa, baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas.

Tabel 2.31. Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan, Dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2015-2017

No	Nama Organisasi Mahasiswa	Jumlah/Jenis Kegiatan	Jumlah Mahasiswa yang Terlibat		
			2015	2016	2017
1	MPM	6	38	767	291
2	BEM	16	4600	9367	1731
3	MENWA	10	756	424	876
4	UKKPK	13	407	1210	5.325
5	UKPPIPM	14	1930	1048	4.675
6	UKWP2SOSPOL	7	436	1304	1.500
7	UKMPALH	10	605	228	2.468
8	UKPRAMUKA	6	625	613	1.446
9	UKUKO	3	54	878	752
10	UKKOPMA	11	402	570	2.354
11	UKKES	20	602	1041	8.876
12	UKFOTO FILM	8	582	575	1.158
13	UKKEROHANIAN	1	2235	110	954
14	UKKSR PMI	3	788	1364	386
15	UKPASKIBRA	9	424	220	890
16	UKGANTO	8	395	606	247
17	BHS ASING	6	-	424	1.199
18	UK HIPMI	9	-	-	4.360
19	UK KEWIRAUSAHAAN	8	-	-	4.607
Jumlah		168	14.879	20.749	44.095

Disamping mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa UNP juga terlibat secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler dibawah sembilan belas payung unit kegiatan kemahasiswaan. Keadaan tahun 2017 menunjukkan sebanyak 44.095 mahasiswa terlibat dalam 131 kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan lebih kurang 50% dari jumlah mahasiswa UNP mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Disamping melalui unit kegiatan kemahasiswaan, Universitas Negeri Padang juga memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang kecakapan hidup (*soft skill*), kepemimpinan, dan ketahanan-malangan serta ajang prestasi, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional seperti yang terlihat pada Tabel 2.32 berikut ini:

Tabel 2.32. Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016-2017

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah/Jenis Kegiatan		Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	
		2016	2017	2016	2017
1	SEMINAR	3	6	1.200	1800
2	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	8	10	1.300	1500
3	KUNJUNGAN INDUSTRI	5	1	350	300
4	LKMM TINGKAT MENENGAH	2	-	300	-
5	LKMM TINGKAT LANJUT	2	1	240	130
6	MAWAPRES	1	1	16	13
7	MTQ	210	152	210	152
8	PMW	1	1	240	160
9	KBM FMIPA	1	-	450	-
10	KBM FIS	1	-	700	-
11	PKM	1	1	132	28
12	PIMNAS	1	-	10	-
13	KBM FIK	1	-	600	-

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah/Jenis Kegiatan		Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	
		2016	2017	2016	2017
14	KBM FT	1	-	700	-
15	KBM FIP	1	-	1440	-
16	KBM FBS	1	-	800	-
Jumlah		240	173	8.688	4.083

Jumlah mahasiswa UNP yang mengikuti program kecakapan hidup sangat mengembirakan. Keadaan tahun 2017 menunjukkan sebanyak 4.083 mahasiswa mengikuti program kecakapan hidup yang ditawarkan oleh UNP dengan tujuan untuk meningkatkan kecapan hidup mahasiwa.

Mahasiswa UNP tahun 2017 mengukir beberapa prestasi dengan mendapatkan sertifikat, piagam, dan medali pada tingkat regional, nasional, dan internasional, seperti yang terlihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33. Penghargaan yang Diperoleh Mahasiswa pada Tahun 2017

No	Jenis Penghargaan	Tingkat		
		Lokal	Nasional	Internasional
1	Sertifikat	0	9	0
2	Piagam	0	0	0
3	Medali Emas	0	35	0
4	Medali Perak	0	27	0
5	Medali Perunggu	0	18	1
Jumlah		0	89	1

4. Sarana-Prasana

Sistem pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Negeri Padang (UNP) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.6/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara pada entitas Pemerintah Pusat. Secara teknis

pelaksanaan pengelolaan aset diatur dengan Keputusan Rektor UNP tentang Perubahan Susunan Tarif/Sewa Barang Milik Kekayaan Negara yang disewakan/dipergunakan untuk mendapatkan dana penunjang pendidikan di lingkungan UNP. Secara rinci pengelolaan dapat dilihat dari empat aspek yaitu:

a) Pengembangan dan pencatatan

Pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan UNP mengacu pada Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UNP 2010-2017. Berdasarkan renstra dan renop yang telah dirumuskan maka pengembangan aset dilakukan secara bertahap sesuai dengan sasaran dan kemampuan anggaran institusi setiap tahunan. Alokasi anggaran dalam pengembangan sarana dan prasana mengalami peningkatan setiap tahun. Hal itu disebabkan oleh adanya dana hibah Luar Negeri dari *Islamic Development Bank* (IDB) untuk rekonstruksi sarana dan prasana di UNP yang akan selesai pada tahun 2016. Selain itu, penambahan aset selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan di antaranya penambahan 6 unit gedung/laboratorium terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa UNP dari dana APBN.

Pencatatan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.6/2013. Secara teknis, pencatatan aset di lapangan dilakukan oleh petugas SIMAK-BMN sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) belanja modal setiap unit di lingkungan UNP. Semua belanja modal tercatat secara baik dalam aplikasi tersebut sehingga memudahkan pimpinan dan pengawas (SPI dan Inspektorat) dalam menghitung jumlah dan penyusutan aset setiap tahunnya.

b) Penetapan Penggunaan

Penggunaan sarana dan prasana didasarkan kepada kebutuhan unit kerja atau usulan pengadaan barang/jasa oleh unit kerja. Secara teknis penetapan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat Universitas adalah wewenang Wakil Rektor II. Sejak tahun 2013 penetapan sarana dan prasarana adalah wewenang Wakil Rektor IV. Sedangkan, penetapan penggunaan aset di tingkat fakultas di bawah Wakil Dekan II. Pengawasan aset dilakukan oleh Kepala Sub Bagian (kasubag) Umum dan Perlengkapan di setiap unit kerja. Meskipun sarana dan prasana berada di fakultas, namun fakultas/unit kerja lain di lingkungan UNP dapat memanfaatkannya (*resource sharing*).

c) Keamanan dan keselamatan penggunaan

Keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasana dilimpahkan kepada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai pengguna aset. Setiap unit kerja harus menjaga keamanan dan keselamatan aset sesuai dengan standar keselamatan yang disyaratkan dalam ISO. Misalnya, setiap gedung harus memiliki racun api, hidran, dan jalur evakuasi seandainya terjadi kebakaran. Secara umum, gedung baru telah dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan penggunaan yang juga aman digunakan bagi sivitas akademika yang memiliki keterbatasan fisik.

d) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan

Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan sarana dan prasarana di lingkungan UNP dilakukan oleh pihak ketiga melalui alih daya (*outsourcing*). Tanggung jawab tersebut dilakukan sepenuhnya oleh petugas di bawah kendali masing-masing unit kerja. Unit kerja dapat mengajukan komplain kepada atasannya apabila petugas alih daya tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 2.34. Lokasi, Kepemilikan, Penggunaan dan Luas Lahan

No.	Lokasi Lahan (Nama dan Nomor Jalan, Kota, Propinsi)	Status Penguasaan/ Kepemilikan Lahan*	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lokasi Air Tawar	Sendiri	Kampus pusat	349.684
2	Lokasi Banda Buat Padang	Sendiri	Kampus FIP	27.930
3	Lokasi Limau manis	Sendiri	Kampus FIP	35.835
4	Lokasi Lubuk buaya	Sendiri	Kampus FIK	34.345
5	Lokasi Bukittinggi	Sendiri	Kampus bersama	34.125
TOTAL				481.919

Keterangan: * Status: milik sendiri, sewa, pinjaman, kerjasama. Siapkan dokumen bukti status penguasaan/kepemilikan lahan.

Tabel 2.35. Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, ruang dosen) yang digunakan institusi dalam penyelenggaraan program/kegiatan institusi mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkantoran/ administrasi	343	10.077	√	-	√	-
2	Ruang kuliah	235	16.090	√	-	√	-
3	Ruang diskusi, seminar, rapat	24	2.210	√	-	√	-
4	Ruang kerja dosen	156	3.569	√	-	√	-
5	Laboratorium/ studio/bengkel	215	16.838	√	-	√	-
6	Ruang Baca	35	3.492	√	-	√	-
7	Rumah dinas jabatan	1	796	√	-	√	-
Luas Seluruhnya			52.072				

Tabel 2.36. Data prasarana lain yang mendukung terwujudnya visi (misalnya tempat pembinaan minat dan bakat, kesejahteraan, ruang himpunan mahasiswa, asrama mahasiswa) mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ruang Pembinaan minat dan bakat	4	5.131	√	-	√	-
2.	Poliklinik	1	406	√	-	√	-
3.	Masjid	1	2.883	√	-	√	-

No.	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan*		Kondisi**	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Musholla fakultas	10	754	√	-	√	-
5.	<i>Assembly Area</i>	9	81	√	-	√	-
6.	Ruang HMJ	45	540	√	-	√	-
7.	Asrama Putra	1	1.875	√	-	√	-
8.	Asrama Putri	1	1.875	√	-	√	-
9.	Ruang BEM	8	96	√	-	√	-
10.	Ruang UKM	1	158	√	-	√	-
11.	Lapangan Olah raga	10	5.416	√	-	√	-
12.	Koperasi mahasiswa	1	54	√	-	√	-
13.	Koperasi UNP	1	819	√	-	√	-
14.	Ruang BPMF	8	96	√	-	√	-
15.	Ruang Musik	3	60	√	-	√	-
16.	<i>Hotspot area</i>	8	120	√	-	√	-
17.	<i>Fitness Centre</i>	2	60	√	-	√	-
18.	Kolam Renang	1	2.922	√	-	√	-
19.	<i>Theatre</i>	1	525	√	-	√	-
20.	<i>Selter Area</i>	8	3.000	√	-	√	-
Luas Seluruhnya			27.411				

Tabel 2.37. Jumlah Judul Cetak, Elektronik dan Copy di Perpustakaan UNP

No	Jenis Pustaka	Jumlah Judul		
		Cetak	Elektronik	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Buku Teks	47.649	648	235.778
2	Jurnal nasional yang terakreditasi	72	63	288
3	Jurnal Internasional	320	15.608	320
4	Prosiding	63	969	1032
JUMLAH		48.104	17.288	237.418

5. Anggaran

Penerimaan dana untuk membiayai seluruh kegiatan di UNP berasal dari mahasiswa, Pemerintah dan pendapatan lain-lain. Tabel 2.38 di bawah ini menunjukkan perkembangan penerimaan UNP tahun 2017.

Tabel 2.38. Jumlah Penerimaan Dana Tahun 2017 (dalam ribuan rupiah)

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi		Saldo
			Pendapatan	Penggunaan	
1.	PNBP	192.830.000	206.601.820	181.882.385	26.336.344
2.	RM (Rutin)	165.872.926	165.872.926	154.922.109	10.950.717
3.	RM (BOPTN)	30.070.943	30.070.943	29.654.414	416.529
4.	RM (PDD-AK)	5.337.721	5.337.721	5.160.760	176.960
5.	RMP	8.474.596	8.474.596	8.444.064	30.531
6.	Hibah	150.781.684	150.781.684	134.951.188	15.830.496
	Total	553.367.870	567.139.690	515.014.920	53.741.577

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penerimaan UNP yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2017 realisasinya sebesar Rp. 181.882.385.000,- sedangkan penerimaan yang berasal dari Kemenristek dan Dikti sebesar Rp. **296.886.396.286,-**. Berarti Penerimaan UNP yang berasal dari pemerintah sebanyak 65,08%. Besarnya bantuan Pemerintah karena sejak tahun 2015 dilakukan pembangunan gedung UNP berasal dari Hibah IDB (*Islamic Development Bank*). Penggunaan dana oleh

UNP pada tahun 2017 juga fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39. Jumlah Penggunaan Dana Tahun 2017

Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
[5741]	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	165,872,926,000	154,922,109,244	93,40%
[5742]	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	192,830,000,000	181,882,385,414	94,32%
	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk PTN (BOPTN)	30,070,943,000	29,654,414,400	98,61%
[5697]	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	5,337,721,000	5,160,760,645	96,68%
[5702]	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB)	159,256,280,000	143,395,252,446	96,68%
	Total	553,367,870,000	515,014,922,149	93,07%

Berdasarkan Tabel 2.39, dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi surplus atau kelebihan dana UNP. Artinya secara umum, setiap tahun penerimaan UNP lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Penggunaan dana UNP setiap tahunnya dialokasikan lebih banyak pada belanja pendidikan. Untuk tahun 2017, besaran anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar 58,96%, sedangkan untuk kegiatan penelitian sebanyak 2,43% dan untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar 1,40%.

C. PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat seperti saat ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi sangat berdampak pada perkembangan organisasi, tata kelola perguruan tinggi, pelaksanaan perkuliahan, dan metode pembelajaran. Teknologi sangat membantu dalam penyediaan sumber pembelajaran dan pengembangan metode pembelajaran di kampus.

Globalisasi yang semakin kuat ditandai dengan penyatuan perekonomian dan perdagangan antar Negara di suatu wilayah, seperti Asean. Globalisasi ekonomi menciptakan peluang dan sekaligus ancaman bagi semua Negara dan perguruan tinggi di Indonesia. Disatu sisi dapat menjadi peluang, karena lulusan perguruan tinggi

mempunyai lapangan kerja dan peluang berkembang yang lebih luas. Namun di sisi lain, globalisasi tersebut akan menyebabkan persaingan lulusan untuk mendapat pekerjaan atau mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi seluruh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Persaingan yang semakin ketat, menyebabkan semakin sulitnya lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan dituntut untuk lebih efisien. Efisiensi menjadi salah satu kunci sukses dalam persaingan. Oleh sebab itu banyak perusahaan mengurangi tenaga kerjanya dan diganti dengan teknologi. Cara lainnya yang dilakukan perusahaan adalah dengan outsourcing pelaksanaan aktivitasnya ke perusahaan lain yang dapat menawarkan efisiensi. Keterbatasan lapangan kerja dan persaingan yang semakin ketat, menyebabkan perguruan tinggi ditantang untuk mampu menghasilkan wirausahawan muda yang kreatif, sehingga mereka tidak lagi mencari pekerjaan tetapi justru menghasilkan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lainnya.

Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat informasi cepat berkembang dan semakin kompleks. Kondisi ini menyebabkan setiap organisasi harus fleksibel, karena hanya fleksibilitas yang dapat menjawab perubahan yang cepat dan kompleks tersebut. Perguruan tinggi harus bisa cepat merespon perubahan yang terjadi. Perubahan kebijakan pemerintah bergeser saat ini bergeser dari *teaching* ke arah *agent of economic development*. Oleh sebab itu perguruan tinggi harus mempunyai lembaga yang diisi oleh brilian dalam rangka menganalisis perubahan yang berdampak pada perguruan tinggi tersebut. Hasil analisis dimaksudkan dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan yang relevan. Dengan demikian, peranan pengembangan strategis sangat penting agar UNP responsif dan programnya fleksibel terhadap perubahan yang terjadi.

Perubahan UNP dari Satuan Kerja (satker) menjadi PK BLU mempunyai dampak perubahan pada berbagai sisi. Organisasi dan tata kerja UNP berubah, sebagai akibat berubahnya sistem administrasi dan wewenang UNP sebagai Badan Layanan Umum. Beberapa badan yang dibutuhkan adalah dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha, dan unit-unit usaha yang harus dikembangkan agar UNP mempunyai penerimaan yang cukup untuk membantu pengembangan UNP sebagai LPTK yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Sistem perencanaan, keuangan, tata kelola, monitoring dan evaluasi serta pelaporan akan berubah dengan diimplementasikannya BLU sejak tahun 2017 yang akan datang.

Tantangan pembangunan pendidikan khususnya tantangan bagi UNP pada masa yang akan datang adalah menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 31 Desember 2015, meningkatkan persaingan lulusan Universitas di Indonesia maupun Asean. Persainagn yang semakin ketat, baik untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk membuka usaha. Peluang membuka usaha juga sangat dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang dihadapi lulusan UNP. Terjadinya pergeseran paradigman pengembangan universitas dari agent of education and research menjadi agent of economic development menjadi tantangan tersendiri bagi UNP. Hal ini disebabkan jumlah luusan yang menjadi *entrepreneur*, relatif masih sedikit sehingga perlu suatu program atau lembaga yang dapat meningkatkan sikap kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Disamping itu, masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan masih cukup lama, sehingga diperlukan suatu usaha yang lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja, berdaya saing tinggi, sekaligus memiliki *skill* yang memadai agar mampu berwirausaha. Untuk hal ini, jaringan alumni dan kerja sama eksternal dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan dan diberdayakan untuk mengatasi kondisi ini. Saat ini UNP masih belum memiliki badan yang secara khusus mengembangkan profesionalisme calon sarjana dan berbagai *softskill* yang membuat mereka siap turun ke masyarakat.

Tantangan lain bagi UNP adalah penemuan berbagai metode, model, dan media pembelajaran serta penemuan dalam bidang sains, teknologi, dan seni. Kualitas universitas sangat ditentukan oleh berbagai penemuan tersebut. Kenyataan saat ini, setiap perguruan tinggi bersaing menghasilkan berbagai penemuan baik dalam bidang pembelajaran dan dalam bidang sains, teknologi, dan seni. Tantangan ini sangat berkaitan dengan kondisi laboratorium yang ada di setiap program studi. Artinya, laboratorium sebagai sarana utama untuk membekali lulusan dengan keterampilan dan pengalaman praktis belum berfungsi secara optimal. Di samping melayani kegiatan pembelajaran, laboratorium juga belum memadai untuk digunakan sebagai sarana penelitian dan penghasil produk-produk aplikatif, terutama laboratorium sains dan teknologi. Hingga saat ini, belum ada laboratorium yang menerapkan atau memperoleh sertifikat ISO 17025, meskipun beberapa prodi telah mengajukan usulan mendapatkan seritikat ISO 17025 ini.

Penataan kepemimpinan dan manajemen universitas yang lebih profesional

merupakan tantangan bagi UNP pada masa yang akan datang. Hal ini tidak bisa dielakkan karena UNP sudah menjadi universitas yang besar. Saat ini jumlah tenaga kependidikan yang ada di lingkungan UNP adalah 404 orang. Dari aspek latar belakang pendidikan, sebaran, serta usianya merupakan tantangan yang cukup berat dalam menata kepemimpinan dan manajemen UNP. Karena itu berbagai usaha pengembangan dan peningkatan kualitas staf nonakademik harus dilakukan secara berkesinambungan agar kemampuannya selalu sejalan dengan perkembangan komunikasi dan informasi.

Pengembangan sarana dan prasarana sebagai aset universitas juga merupakan tantangan UNP untuk masa depan. Perkembangan UNP yang semakin besar terutama dari jumlah mahasiswa yang semakin banyak harus sejalan dengan pengembangan sarana dan prasarana UNP. Berbagai sarana dan prasarana seperti tempat parkir, ruang kelas, ruang pustaka (pustaka fakultas atau prodi), kendaraan (bus), dan fasilitas olahraga harus dilengkapi dan dikembangkan secara terus-menerus untuk melayani kebutuhan seluruh sivitas akademika UNP. Selain itu, semua sarana dan prasarana yang telah dimiliki tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan profesional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya, termasuk menjadikan aset tersebut sebagai sumber *income generating* jika UNP menjadi BLU. Hal ini tidak akan dapat terkelola dengan baik jika tidak ada pembantu rektor yang khusus menangani mengenai pengelolaan aset universitas dengan baik dan bagaimana agar aset tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan universitas. Oleh karena itu, UNP membutuhkan Pembantu Rektor IV yang khusus menangani kerjasama dan pengelolaan aset.

Berdasarkan kondisi beban kerja saat ini dan beratnya tantangan yang dihadapi di atas, struktur organisasi dan tata kerja UNP yang ada saat ini berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNP sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dirasakan tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan kerja yang diemban Universitas Negeri Padang. Selain itu permasalahan ini juga timbul dari perkembangan UNP dalam berbagai aspek, seperti: (1) Perkembangan jumlah Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; (2) Perkembangan Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/Studio/Bengkel/Workshop/Kebun Percobaan; (3) Perkembangan Sarana, Prasarana sebagai aset universitas.

Atas dasar perkembangan tersebut UNP tersebut, permasalahan yang muncul yakni:

(1) Beban kelembagaan yang tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; (2) tidak seimbangnya beban kerja antara unit yang satu dengan unit yang lain, (3) diperlukan adanya unit kerja baru yang sangat dibutuhkan namun belum tercantum dalam OTK UNP pada Keputusan Kemenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UNP. (4) ketidaksesuaian antara unit kerja yang ada dengan kegiatan yang harus dilaksanakan, (5) diperlukan organ baru dalam rangka menunjang kegiatan, Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha, Badan Penjaminan Mutu Internal, Badan Pengawas, dan Unit lainnya.

BAB III

RENCANA PENGEMBANGAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Strategis

1. Visi UNP

Visi UNP adalah :

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi UNP

Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan misi UNP sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.
- c) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
- d) Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
- e) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut.

- a) Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter tangguh dan berdaya saing global.
- b) Membentuk mahasiswa yang berkarakter tangguh
- c) Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif
- d) Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat nasional dan internasional

- e) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
- f) Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan
- g) Terwujudnya tata kelola universitas yang baik (*good university governance*)
- h) Terwujudnya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan
- i) Terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional
- j) Terwujudnya kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas bertaraf internasional
- k) Terbangunnya sivitas akademika yang berwawasan global

B. Perencanaan dan Program Pengembangan UNP

1. Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kegiatan penjaminan mutu internal mulai dari program studi dan jurusan (Unit Penjaminan Mutu), Fakultas (Gugus Penjaminan Mutu) dan Universitas (Badan Penjaminan Mutu)
 - b. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan
 - c. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam event-even (kompetisi) nasional dan internasional
 - d. Peningkatan pembelajaran berbasis riset dan TI (*e-learning* dan *blended learning*)
 - e. Peningkatan proporsi jumlah mahasiswa pascasarjana dan profesi
 - f. Pengembangan laboratorium
 - g. Peningkatan kualitas calon mahasiswa baru
 - h. Peningkatan calon mahasiswa berprestasi di berbagai bidang (olahraga, seni, kreatifitas, sains, agama, kewirausahaan, pariwisata, kecantikan, busana, dan lainnya)
 - i. Penerimaan mahasiswa asing
 - j. Pengadaan buku teks dan buku ajar
 - k. Peningkatan perkuliahan dengan *blended* dan *e-learning*
 - l. Penyempurnaan kurikulum
 - m. Penerbitan jurnal Nasional terakreditasi
 - n. Penerbitan jurnal internasional bereputasi

- o. Peningkatan kualitas bahasa asing mahasiswa
 - p. Pelatihan dan *workshop* dosen dan tenaga kependidikan
 - q. Peningkatan inovasi model pembelajaran
 - r. Penyelenggaraan resipatori pembeajaran lampau (RPL)
 - s. Peningkatan frekuensi dan waktu praktek lapangan mahasiswa
 - t. Perkuliahan dengan dosen praktisi
 - u. Pelaksanaan pendidikan profesi
 - v. Peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat
 - w. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi sains, kratifitas, olahraga dan seni di tingkat nasional dan internasional
 - x. Pelaksanaan kompetisi sains, kratifitas, olahraga dan seni secara berkala di universitas
 - y. Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa
 - z. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa
 - aa. Pelatihan mahasiswa tentang kewirausahaan
 - bb. Pelatihan penguatan karakter bagi mahasiswa
 - cc. Pengembangan organisasi keahasiswaan
 - dd. Perkuliahan baik vokasional, sarjana, magister, profesi dan doktor
 - ee. Pembimbingan mahasiswa dalam penyelesaian Tugas Akhir, skripsi, tesis dan disertasi
 - ff. Pelaksanaan ujian bagi mahasiswa vokasional, sarjana, magister, profesi dan doktor.
 - gg. Layanan pusat karir dan kewirausahaan
 - hh. Pelaksanaan *tracer study*
 - ii. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - jj. Bimbingan teknis sistem penjaminan mutu internal
 - kk. Pelaksanaan ujian kompetensi
 - ll. Pengadaan peralatan labor
 - mm. Pelatihan auditor internal
2. Bidang Kelembagaan, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. Penerapan sistem akademik, penelitian, publikasi karya ilmiah, Pengabdian kepada masyarakat, manajemen sumberdaya manusia, keuangan, perencanaan,

- kerjasama dan asset secara online dan terintegrasi.
- b. Peningkatan jumlah penerimaan PNBPN melalui unit bisnis, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Peningkatan akreditasi prodi, laboratorium dan Universitas
 - d. Pembukaan Fakultas Baru (Fakultas Psikologi dan lain-lain) dan Prodi Baru baik diploma dan S1 diseluruh Fakultas, Magister (S2) baik Kependidikan maupun non-kependidikan seperti Teknik Elektro, Manajemen Olah Raga, dan lain-lain.
 - e. Penyusunan perencanaan strategis
 - f. Penyusunan perencanaan tahunan dan RKAKL
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian resntra
 - h. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 - i. Penyusunan dokumen hukum, humas dan kerjasama
 - j. Pelaksanaan humas (PR)
 - k. Layanan pengelolaan Aset BMN
 - l. Layanan kepegawaian
 - m. Layanan perkantoran
 - n. Layanan tata usaha pimpinan
 - o. Penyusunan proposal pendirian fakultas baru
 - p. Penyusunan proposal pendirian prodi baru
 - q. Pelaksanaan akreditasi perpustakaan
 - r. Pelaksanaan akreditasi program studi
 - s. Pelaksanaan akreditasi institusi
 - t. Pelaksanaan akreditasi internasional
 - u. Pelaksanaan akreditasi sekolah labor
 - v. Pencetakan buku teks, buku ajar dan karya ilmiah dosen dan mahasiswa
 - w. Pendirian unit-unit bisnis (usaha)
 - x. Renovasi gedung
 - y. Penambahan ruang kuliah dan fasilitas pendidikan baru
 - z. Pengadaan (pembangunan) pagar dan taman
 - aa. Pembangunan atau penataan drainase (lingkungan) kampus
 - bb. Penambahan daya/bandwidth UNP
 - cc. Peningkatan kualitas labor mikro teaching
 - dd. Pengadaan peelengkapan sarana pendukung gedung baru

- ee. Peningkatan implementasi sistem manajemen mutu di seluruh unit
 - ff. Peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu internal
 - gg. Peningkatan kerjasama baik nasional dan internasional
 - hh. Peningkatan jumlah prodi kelas internasional
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. Implementasi Remunerasi
 - b. Peningkatan jumlah Doktor dan Guru Besar
 - c. Peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan baru
 - d. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Penyaluran tunjangan profesi dosen
 - f. Penyaluran tunjangan kehormatan guru besar
 - g. Penyaluran remunerasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan
 - h. Penyaluran tunjangan kinerja
 - i. Layanan tata usaha bidang sumberdaya
 - j. Peningkatan sistem informasi SDM
 - k. Penyusunan perencanaan pengembangan SDM
 - l. Penerimaan tenaga pendidik
 - m. Penerimaan tenaga kependidikan
 - n. Penerimaan tenaga pendidikan status kontrak
 - o. Penerimaan tenaga kependidikan status kontrak
 - p. Pengadaan dosen tamu/ahli dan praktisi dari dalam dan luar negeri
 - q. Pengadaan dokumen sistem informasi karir dosen dan tenaga kependidikan
 - r. Pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan
 - s. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
 - t. Penilaian angka kredit point tenaga pendidik
 - u. Pembinaan karir bagi tenaga kependidikan
 - v. Pengusulan kepanaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan
 - w. Peningkatan kompetensi dosen (pelatihan, seminar, konferensi, diklat, lomba, olahraga, workshop, lokakarya dll)
 - x. Peningkatan tenaga kependidikan (pelatihan, workshop, lomba, olahraga, diklat,

- lokakarya dll).
- y. Pelibatan dosen dalam berbagai even prestasi nasional dan internasional
 - z. Pelibatan tenaga kependidikan dalam berbagai even prestasi nasional dan internasional
 - aa. Keterlibatan dosen dalam forum ilmiah nasional dan internasional
 - bb. Keterlibatan dosen dalam forum profesi nasional dan internasional
 - cc. Keterlibatan dosen dalam kepemimpinan public
 - dd. Keterlibatan dosen dalam short term programe (PAR, Same dll)
 - ee. Revitalisasi sarana-prasarana
 - ff. Pengadaan tanah kampus baru
 - gg. Pengadaan kendaraan baru
 - hh. Peningkatan jumlah dosen studi lanjut di dalam dan luar negeri
 - ii. Penyusunan rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan
4. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Peningkatan penelitian kerjasama dengan Industri, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri
 - c. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi
 - d. Layanan perkantoran LP2M
 - e. Peningkatan hasil penelitian dalam bentuk prototype R & D
 - f. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi
 - g. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal nasional, prosiding dan publikasi ilmiah lainnya
 - h. Peningkatan keterlibatan dosen dalam lomba inovasi tingkat internasional
 - i. Penerbitan buku teks
 - j. Penerbitan jurnal ilmiah nasional terakreditasi
 - k. Penerbitan jurnal ilmiah internasional
 - l. Penerbitan jurnal ilmiah nasional
 - m. Peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat
 - n. Peningkatan keterlibatan dosen dalam pemecahan masalah kemasyarakatan
 - o. Pelaksanaan program kreatifitas mahasiswa

- p. Peningkatan jumlah HAKI
 - q. Peningkatan fasilitasi publikasi karya ilmiah pendidikan
5. Bidang Inovasi, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan penelitian inovatif yang dapat diproduksi dan dipakai industri.
 - b. Peningkatan jumlah HAKI dan Paten
 - c. Peningkatan hasil penelitian hilirisasi produk
6. Bidang Manajemen dan Pengawasan, program prioritas pengembangan adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas manajemen universitas mulai dari program studi, jurusan, fakultas dan unit-unit sampai ke universitas.
 - b. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan LAKIP
 - c. Peningkatan kerjasama dengan akuntan publik dan BPK
 - d. Penyusunan program, kegiatan dan penganggaran
 - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan
 - f. Penyusunan akuntabilitas dan pelaporan
 - g. Pengadaan aplikasi sistem perencanaan UNP
 - h. Peningkatan penerimaan PNBPN
 - i. Penyusunan SOTK baru
 - j. Pengadaan aplikasi sistem penerimaan online dan integrative
 - k. Penataan sistem pemanfaatan asset UNP
 - l. Peningkatan jumlah unit bisnis
 - m. Pengembangan Mess dan Asrama mahasiswa
 - n. Pengadaan kelengkapan sarana-prasarana Mess dan Asrama Mahasiswa
 - o. Pengadaan kelengkapan sarana-prasarana kolam renang dan sarana olahraga lainnya
 - p. Peningkatan disiplin dosen dan tenaga kependidikan
 - q. Peningkatan kualitas sistem informasi dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan
 - r. Peningkatan kualitas karakter dosen dan tenaga kependidikan
 - s. Penyaluran insentif tugas tambahan dosen di lingkungan UNP
 - t. Peningkatan pemahaman dosen dan tenaga kependidikan tentang PK-BLU
 - u. Layanan akuntansi pelaporan

- v. Pengadaan aplikasi sistem akuntansi pelaporan pengeluaran UNP
 - w. Pelaporan keuangan BMN dan penerapan e-pengadaan paket PBJ
 - x. Layanan advokasi hukum
 - y. Layanan bagian kelembagaan
 - z. Layanan bagian ketatalaksanaan
 - aa. Layanan bidang kerjasama dalam dan luar negeri
 - bb. Layanan bidang hubungan masyarakat
 - cc. Layanan bidang Publikasi dan dokumentasi
7. Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan, programnya adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan pelaporan dan LAKIP
 - b. Penyusunan dokumen umum dan keuangan
 - c. Penyusunan dokumen hukum
 - d. Penyusunan dokumen sistem informasi pengawasan
 - e. Pelaksanaan rapat senat fakultas dan universitas
 - f. Pengadaan Badan Pengawas UNP
 - g. Pelaksanaan pengawasan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - h. Pelaksanaan penilaian akuntan publik atas laporan keuangan UNP
 - i. Pelaksanaan audit penjaminan mutu oleh lembaga eksternal
 - j. Pelaksanaan evaluasi kepuasan pelanggan UNP

BAB IV

USULAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Dasar Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Dasar perubahan organisasi dan tata kerja dimulai dari perubahan identitas organisasi dan perluasan mandat (*wider mandate*) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999. Perubahan identitas institusi ini melahirkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru sebagai universitas dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/O/1999. Perubahan pertama OTK setelah menjadi universitas dilakukan pada tahun 2004 dengan tujuan penambahan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 093/O/2004. Kemudian diikuti dengan perubahan kedua pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 tentang penambahan organ baru yaitu Fakultas Ekonomi (FE).

Perubahan ketiga diusulkan tahun 2013 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang baik bagi masyarakat, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 32 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan beberapa aturan lainnya yang terkait. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Negeri Padang.

Usulan perubahan OTK tahap ketiga secara internal berpedoman pada arah pengembangan lembaga pendidikan tinggi yang berdaya saing sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga yang akan diemban 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tertuang dalam Statuta dan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri

Padang tahun 2015 s.d 2019.

Perubahan keempat diusulkan pada Tahun 2018 guna menyesuaikan dengan organ-organ pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang. Dasar utama dari perubahan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor. 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perubahan OTK ini juga menyesuaikan dengan Perubahan yang terjadi di Tingkat Kementerian yaitu semula berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015).

B. Usulan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Perubahan struktur organisasi UNP diarahkan pada pembagian dan pendelegasian tugas dan fungsi (TUPOKSI) yang jelas untuk masing-masing unit/unsur yang ada termasuk beberapa penambahan seperti; Dewan Pengawas, Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), Pengaturan kembali Tugas Pokok Satuan dan Unit Kerja di Tingkat Biro, Penambahan Fakultas Pendidikan Psikologi yang sebelumnya belum ada dalam SOTK.

Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU Universitas Negeri Padang oleh Pejabat BLU Universitas Negeri Padang terutama mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan Ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU); BPPU berfungsi untuk membantu Universitas melakukan optimalisasi pemanfaatan aset dan inventarisasi sumberdaya berupa aset sarana prasarana, aset sumber daya manusia, pembuatan rencana program kegiatan pengembangan usaha, dan inisiator kerjasama dengan unit atau lembaga lain didalam ataupun dari luar Universitas Negeri Padang yang tujuan

utamanya adalah peningkatan pendapatan *income generating* Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang.

Penataan Tugas dan Fungsi di lingkungan Biro, ditujukan guna menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi sehari-hari (Tusi) di antara bagian satu dengan bagian lainnya dalam Biro Umum dan Keuangan. Pemindehan ini didasarkan terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi subbagian hukum dan tatalaksana dengan subbagian tenaga kependidikan di bidang tugas melaksanakan analisis jabatan, pembuatan surat-surat keputusan atau peraturan Rektor, bidang ketatalaksanaan yaitu pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan.

Perubahan Tugas dan Fungsi pada Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara (UHBMN) dan Bagian Kepegawaian pada Biro Umum dan Keuangan (BUK) pada Permenristek Dikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Kerja UNP; yang semula Bagian UHBMN memiliki 4 sub bagian, yaitu; Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Subbagian Barang Milik Negara, serta Sub-Bagian Hukum dan Tata Laksana. Sekarang menjadi Bagian Umum dan Barang Milik Negara (UBMN) dengan 3 subbagian, yaitu; Subbagian Tata Usaha, Subbagian Rumah Tangga serta Subbagian Barang Milik Negara.

Selanjutnya Bagian Kepegawaian yang semula memiliki 2 Subbagian, yaitu; Subbagian Pendidik dan Subbagian Tenaga Kependidikan berubah menjadi Bagian Hukum dan Kepegawaian (HKP) yang memiliki 3 Subbagian, yaitu; Subbagian Pendidik, Subbagian Tenaga Kependidikan dan Subbagian Hukum dan Tata Laksana.

Perubahan Tugas dan Fungsi Subbagian Barang Milik Negara (BMN) yang semula berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Kerja UNP mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, menyimpan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan BMN, sekarang mempunyai tugas Inventarisasi, Penyimpanan (Gudang) dan Penghapusan BMN. Fungsi penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan beralih ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Pengadaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka susunan organisasi UNP yang baru terdiri dari beberapa penggolongan jabatan yang digambarkan sebagai berikut:

1. Senat UNP
2. Pemimpin Perguruan Tinggi; (Universitas yaitu Rektor & Wakil Rektor).

Unit Organ dibawah Pemimpin Perguruan Tinggi terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Pendidikan:

- a) Fakultas
 - 1) Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - 2) Fakultas Bahasa dan Seni;
 - 3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 4) Fakultas Ilmu Sosial;
 - 5) Fakultas Teknik;
 - 6) Fakultas Ilmu Keolahragaan;
 - 7) Fakultas Ekonomi;
 - 8) Fakultas Pariwisata dan Perhotelan;
 - 9) Fakultas Pendidikan Psikologi.

Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan terdiri atas:

- 1. Dekan dan Wakil Dekan
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - b. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 2. Bagian Tata Usaha:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
 - c. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara

Fakultas Pendidikan Psikologi terdiri atas:

- 1. Dekan dan Wakil Dekan
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Senat Fakultas
- 4. Jurusan/Bagian
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Program Studi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Laboratorium/Bengkel/Studio

b) Pascasarjana

1. Direktur
2. Wakil Direktur
 - a. Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
 - b. Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan
3. Subbagian Tata Usaha
4. Program Studi

2. **Unit Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:**

a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bagian Tata Usaha
 - a. Subbagian Program, Data dan Informasi
 - b. Subbagian Umum
4. Pusat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada LP2M ini dapat dibentuk Pusat-pusat kegiatan yang pembentukan dan penutupan dilakukan oleh Rektor disesuaikan dengan kebutuhan. Pusat-pusat yang berada dibawah LP2M telah dibentuk saat ini, yaitu;

- 1) Pusat Penelitian;
- 2) Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Pusat Publikasi dan HKI.

b) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bagian Tata Usaha
 - a. Subbagian Program, Data dan Informasi
 - b. Subbagian Umum
4. Pusat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada LP3M ini dapat dibentuk Pusat-pusat kegiatan yang pembentukan dan penutupan dilakukan oleh Rektor disesuaikan dengan kebutuhan. Pusat-pusat yang berada dibawah LP3M telah dibentuk saat ini, yaitu;

- 1) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Pusat Program Pengalaman Lapangan.

3. Unit Pelaksana Adminitrasi atau Ketatausahaan:

- a) Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 1) Bagian Akademik
 - a) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi
 - b) Subbagian Registrasi dan Statistik
 - 2) Bagian Kemahasiswaan
 - a) Subbagian Minat, Bakat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan
 - b) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni
- b) Biro Umum dan Keuangan;
 - 1) Bagian Keuangan
 - a. Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
 - 2) Bagian Hukum dan Kepegawaian
 - a. Subbagian Pendidik; dan
 - b. Subbagian Tenaga Kependidikan
 - c. Subbagian Hukum dan Tata Laksana
 - 3) Bagian Umum dan Barang Milik Negara
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Rumah Tangga
 - c. Subbagian Barang Milik Negara
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Bagian Perencanaan
 - a. Subbagian Perencanaan dan penganggaran
 - b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program

- 2) Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
 - a) Subbagian Kerjasama
 - b) Subbagian Hubungan Masyarakat

 4. ***Unit Pengembangan dan Pelaksanaan Tugas Strategis.***
Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU)

 5. ***Unit Penunjang Teknis***
 - 1) Perpustakaan
 - a) Kepala
 - b) Subbagian Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a) Kepala
 - b) Subbagian Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Bahasa
 - a) Kepala
 - b) Petugas Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Pelayanan Bimbingan Konseling
 - a) Kepala
 - b) Petugas Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Layanan Internasional
 - a) Kepala
 - b) Petugas Tata Usaha
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 6) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
 - a) Kepala
 - b) Subbagian Tata Usaha; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

 6. ***Satuan Pengawas Internal***

 7. ***Dewan Pengawas***
-

8. *Dewan Pertimbangan*

C. Penataan Organisasi dan Tata Kerja

1. Pembentukan Dewan Pengawas.

Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Khusus di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor. 33 Tahun 2009. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU Universitas Negeri Padang oleh Pejabat BLU Universitas Negeri Padang terutama mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan Ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Jumlah anggota Dewan Pengawas ini sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan dan Profesional (Ahli). Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

2. Usulan Penambahan dan Penataan Fakultas di Universitas Negeri Padang

Usulan penambahan dan penataan yang akan dilakukan di tingkat fakultas terdiri dari Penambahan Fakultas Pendidikan Psikologi, sehingga dengan demikian secara keseluruhan UNP memiliki 9 (sembilan) fakultas yaitu;

- a) Fakultas Ilmu Pendidikan disingkat FIP;
- b) Fakultas Bahasa dan Seni disingkat FBS;
- c) Fakultas Ilmu Sosial disingkat FIS;
- d) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam disingkat FMIPA;
- e) Fakultas Teknik disingkat FT;
- f) Fakultas Ilmu Keolahragaan disingkat FIK;

- g) Fakultas Ekonomi disingkat FE;
- h) Fakultas Pariwisata dan Perhotelan disingkat FPP;
- i) Fakultas Pendidikan Psikologi disingkat FPPsi.

Penambahan Fakultas Pendidikan Psikologi didasari oleh pertimbangan-pertimbangan seperti berikut:

- a) Menjalankan tugas dan tanggung jawab pemberian perluasan mandat, yaitu; selain menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan atau tetap menyelenggarakan dan mengembangkan program-program studi kependidikan, selain itu juga mengelola program studi non kependidikan;
- b) Renstra UNP 2015-2019 yang berisikan komitmen pimpinan UNP yang didukung oleh Senat Universitas untuk membuka Fakultas Pendidikan Psikologi termasuk prioritas utama sejak tahun 2016;
- c) Program Studi Psikologi UNP yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan telah meluluskan 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) Sarjana Psikologi;
- d) Berdasarkan *tracer study* yang dilakukan pada tahun 2012, lulusan Prodi Psikologi Jurusan BK FIP UNP tersebut telah bekerja di instansi pemerintah dan swasta;
- e) Besarnya animo lembaga/instansi pemerintah maupun swasta terhadap penerimaan mahasiswa saat melakukan magang pada berbagai instansi, seperti beberapa BANK, TELKOM, POLDA, BKD, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, perusahaan dan instansi pemerintah lainnya;
- f) Peminat yang cukup besar dari calon mahasiswa baru pada SNMPTN, misalnya pada tahun 2006 minat pada Program Studi Psikologi mencapai 1.800 orang dan meningkat terus secara signifikan dari tahun ke tahun. Peminat yang dimaksud berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri, provinsi tetangga, seperti Riau, Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan, bahkan ada dari pulau Jawa;
- g) Kualitas lulusan Prodi Psikologi UNP juga tidak ketinggalan dari Perguruan Tinggi terkemuka lainnya di Indonesia. Sampai akhir tahun 2013, tercatat sebanyak 18 orang alumni melanjutkan pendidikan Magister Profesi Psikolog di UI, UNPAD, UGM, UNISBA, UMM dan UII. Lima diantaranya telah lulus sebagai psikolog dan salah satunya meraih gelar *cumlaude*. Mereka mengakui bahwa secara kualitas mereka cukup percaya diri untuk bersaing dan berkompetisi dengan lulusan psikologi dari universitas lain;
- h) Berdasarkan SK BAN DIKTI No. 36/BAN-PT/AK-XIII/S1/I/2011 bahwa Program

Studi Psikologi telah terakreditasi B. Berdasarkan hal tersebut, artinya program studi ini telah diakui kelayakannya sebagai penyelenggara Pendidikan Psikologi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan pada program studi ini menjadi fakultas agar dapat meningkatkan statusnya;

- i) Jumlah dosen seluruhnya 39 orang yang terdiri dari 24 dosen tetap dalam bidang studi serta 15 dosen tetap luar bidang studi. Dari total 37 orang dosen memiliki kualifikasi 4 guru besar, 3 doktor, 8 magister psikolog, 7 magister sains psikologi (ilmuwan psikologi), 3 orang Magister Bimbingan dan Konseling dan Konselor, 4 orang Magister Pendidikan, 2 orang Sarjana Ilmu pendidikan, 1 orang psikolog, 2 orang sarjana psikologi, 1 orang dokter. 2 orang dosen sedang melanjutkan jenjang pendidikan S2 dan 2 orang melanjutkan pendidikan Program Doktorat;
- j) Sarana prasarana pendukung kelancaran proses belajar mengajar juga telah tersedia seperti gedung kantor dan ruang perkuliahan, 3 (tiga) ruang Laboratorium Psikologi, perpustakaan, dan ruang komputer. Selain itu telah tersedia buku-buku, jurnal, alat tes psikologi, aparatus eksperimen, stimulasi perkembangan anak, CCTV, multimedia untuk pembelajaran, LCD, koleksi CD Pembelajaran dan lain-lain. Jumlah staf pengajar dan fasilitas pun dinilai telah cukup memadai untuk menjalankan roda pendidikan psikologi dalam bingkai Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Padang.

3. Penataan dan Pengaturan Tugas Pada Biro Umum dan Keuangan

Penataan dan Pengaturan Tugas pada Bagian unit kerja di bawah Biro Umum dan Keuangan, dilakukan pada tingkat subbagian pada Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara (UHBMN) dan Bagian Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Kerja UNP Subbagian Hukum dan Tatalaksana berada di bawah Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara pindah ke Bagian Hukum dan Kepegawaian. Sehingga Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara (UHBMN) berubah nama menjadi Bagian Umum dan Barang Milik Negara (UBMN) dan Bagian Kepegawaian berubah nama menjadi Bagian Hukum dan Kepegawaian.

4. Penataan dan Penambahan Badan

Pembentukan Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (selanjutnya disingkat

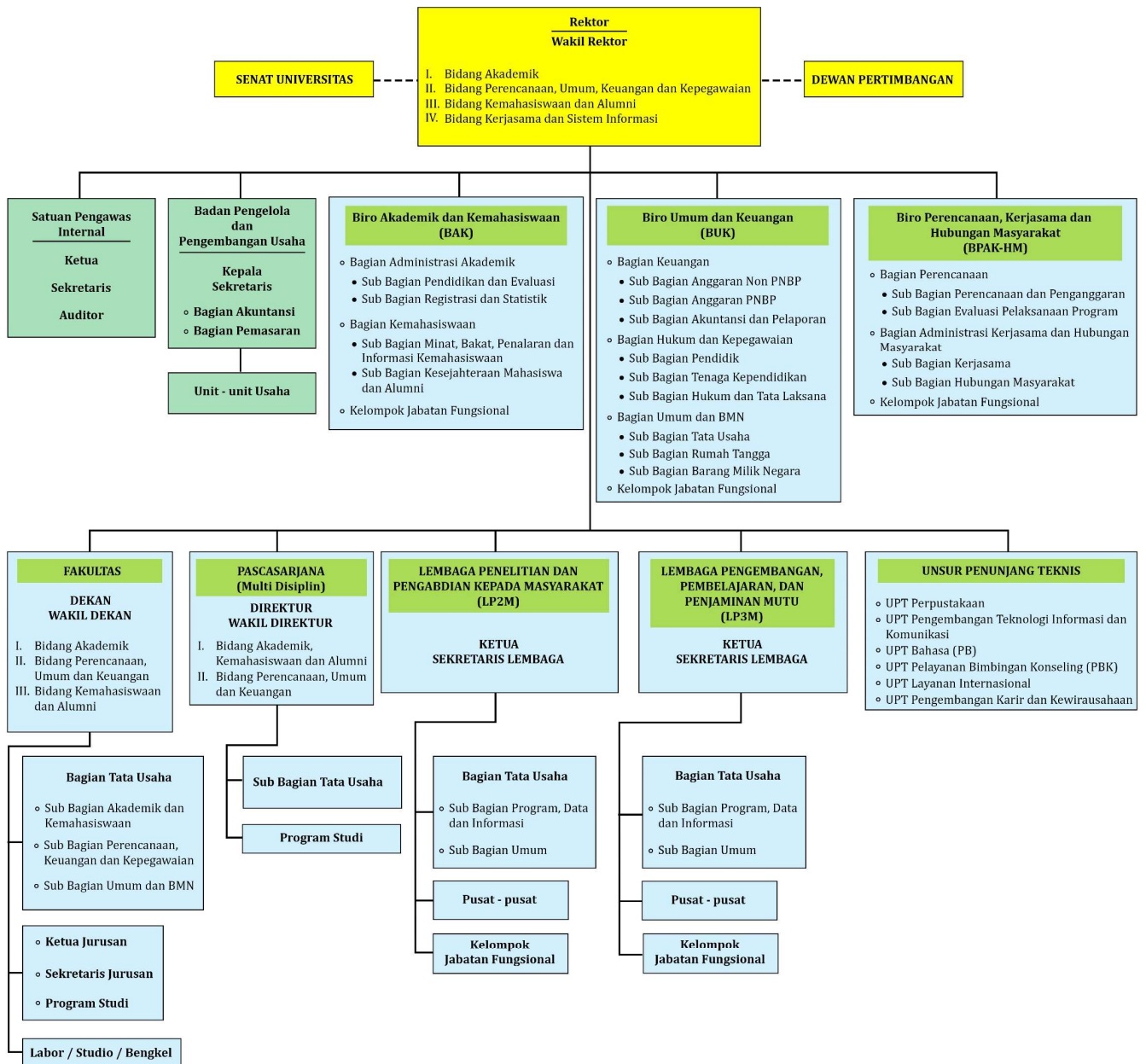
dengan istilah BPPU); BPPU berfungsi untuk membantu Universitas melakukan optimalisasi pemanfaatan aset dan inventarisasi sumberdaya berupa aset sarana prasarana, aset sumber daya manusia, pembuatan rencana program kegiatan pengembangan usaha, dan inisiator kerjasama dengan unit atau lembaga lain didalam ataupun dari luar Universitas Negeri Padang yang tujuan utamanya adalah peningkatan pendapatan *income generating* Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Padang.

BPPU nantinya dibentuk berdasarkan kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang. Struktur Organisasi BPPU dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris yang berasal dari Dosen (Tenaga Pendidik) yang mendapat Tugas Tambahan. Selain Kepala dan Sekretaris juga dilengkapi dengan 2 (dua) Subbagian Tata Usaha (Eselon IV a) yaitu Sub-Bagian Akuntansi dan Sub-Pemasaran dan beberapa orang staf tata usaha.

BPPU Universitas Negeri Padang akan mengelola berbagai usaha yang saat ini sudah ada yaitu: Mess, Asrama, Hospitality (Hotel), Poliklinik, Kendaraan, Kolam Renang, Food Court/Kantin, Auditorium, GOR, Lapangan Olahraga, Lapangan Tenis Indoor Pelatihan-pelatihan, Sekolah Laboratorium dan nantinya akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan usaha dan lembaga.

Dengan demikian perubahan struktur organisasi Universitas Negeri Padang sebagaimana tergambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK) UNIVERSITAS NEGERI PADANG



BAB V

PENUTUP

Visi Universitas Negeri Padang adalah Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya dapat diwujudkan dengan kesiapan Universitas Negeri Padang menjadi organisasi yang sehat dan produktif dan memadai untuk mendukung tercapainya visi tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor. 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Oleh karena itu, penataan struktur organisasi Universitas Negeri Padang yang sesuai dengan PK-BLU dan responsif terhadap kebutuhan serta perkembangan internal dan eksternal (*global*) universitas mutlak diperlukan. Usulan penataan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang dilakukan mulai dari tingkat manajemen pada rektorat sampai dengan unsur-unsur penunjang.

Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang yang baru diharapkan akan mendukung implementasi PK-BLU dan menciptakan iklim organisasi yang tertata secara sistematis dan komprehensif serta relevan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi terhadap perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang akan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi internal dan hasil capaiannya dilaporkan kepada publik dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Universitas Negeri Padang.

Peraturan Menteri tentang SOTK Universitas Negeri Padang akan menjadi pedoman atau acuan dasar untuk melakukan re-strukturisasi yang jelas, tertata, efisien dan efektif.